

Tesis Sumantri.pdf

by Cek Turnitin

Submission date: 02-May-2024 04:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 2368698379

File name: Tesis_Sumantri.pdf (1.12M)

Word count: 19230

Character count: 130621

T E S I S

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA
SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Studi Kasus : Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik
Pada Program Studi Magister Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

SUMANTRI

NPM : 22550004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2024

T E S I S

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA
SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**
Studi Kasus : Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan



Oleh :
SUMANTRI
NPM :22550004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

T E S I S

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA
SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Studi Kasus : Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan**

Oleh :

S U M A N T R I

NPM :22550004

Surabaya, 6 Januari 2024
Komisi Pembimbing

Oleh

9
Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.

Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA
SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**
Studi Kasus : Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan

oleh :

S U M A N T R I
NPM :22550004

Telah dipertahan di depan Dewan Penguji dan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal, 6 Januari 2024

Menyetujui

Komite Dosen Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.

Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si.

Komite Dewan Penguji,
Ketua Dewan Penguji,

Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.

Anggota,

Anggota,

Anggota,

Dr. Federik Fernandez, Drs.,M.Pd.

Dr. Ratna Ani Lestari, M.M

Dr. Darsono, Drs., M.Si.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.

MOTO

*"Berani bertindak, bijak berfikir, dan tulus berkarya
untuk perubahan yang positif."*

*"Momentum is a gift; use it wisely, strive for progress,
and leave a positive impact."*

KATA PENGANTAR



⁵⁸ Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik.

⁴¹ Penyusunan thesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan sumbangsih dan motivasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- ⁷¹ 1. Terima kasih kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.
- ⁹⁰ 2. Penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak **Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.** dan Bapak **Drs. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si.**, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan thesis ini.
- ¹³ 3. Terima kasih kepada para pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pandangan dalam wawancara serta survei, memberikan warna dan makna pada penelitian ini.
- ¹⁹ 4. Terima kasih kepada pemerintah kota Surabaya dan semua pihak terkait yang telah memberikan izin, data, dan informasi yang mendukung kelancaran penelitian ini.
- ⁵⁹ 5. Rasa terima kasih kepada teman-teman sekantor yang memberikan dukungan, semangat, dan diskusi yang berharga sepanjang perjalanan penelitian ini.

6. Penghargaan ⁶⁷ kepada semua pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan thesis ini.

⁴¹ Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, terutama dalam upaya meningkatkan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Akhir kata, penulis berharap agar Allah ⁷⁸ SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 22 Desember 2023

S u m a n t r i

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUMANTRI**

NPM : **22550004**

Alamat : Jl. Dukuh Kupang Barat II No. 32, Surabaya

No. Telp. (HP) : 08155208837

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus : Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan)”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 22 Desember 2023

Yang Menyatakan,

Sumantri
NPM.22550004

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	7
4. Kajian Teoritis	8
5. Metode Penelitian	11
6. Sistematika Penulisan Tesis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
1. Penelitian Terdahulu	16
2. Tahap-Tahap dalam Perumusan Kebijakan	24
3. Faktor-Faktor Dalam Perumusan Kebijakan	26
4. Model Pembuatan Keputusan Kaufman	32
5. Tahap Implementasi Kebijakan	34
6. Struktural Birokrasi	37
7. Tahap Evaluasi Kebijakan	38
8. Monitoring Kebijakan	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
1. Pendekatan Penelitian	45
2. Lokasi Penelitian	45

3. Fokus Penelitian	46
4. Teknik Pengumpulan Data	46
5. Proses Memasuki Wilayah Penelitian	47
6. Hubungan Dengan Subjek dan Instrumen Penelitian	48
7. Proses Pengumpulan Data	49
8. Keandalan Data	49
9. Teknik Analisa Data	50
BAB IV TEMUAN HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Hasil Wawancara	58
2. Pembahasan Masalah	62
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	92
2. Saran	93
DAFTAR BACAAN	96
LAMPIRAN	98

1 DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Tahapan-Tahapan Kebijakan 95	20
Gambar II.2 Kerangka Kerja Sistem yang dikembangkan oleh Easton	24
Gambar II.3 Pengambilan Keputusan dan Manajemen Konflik	33
Gambar II.4 Evaluasi Charles O. Jones	41
Gambar II.5 Standar Pengawasan	42
Gambar III.1 Komponen Analisa Data : Model Interaktif Miles dan 60 Huberman	55

**IMPLEMENTASI PERDA SURABAYA NOMOR 17 2004
TENTANG PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Studi kasus : Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan. Dengan fokus pada aspek-aspek ekonomi dan sosial, penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan pemberdayaan terhadap kondisi usaha pedagang kaki lima dan kontribusinya terhadap ekonomi lokal.

Metode penelitian yang digunakan melibatkan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedagang kaki lima, pemangku kepentingan terkait, dan analisis dokumen terkait kebijakan. Selain itu, survei dan observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam implementasi Perda antara Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan. Meskipun kebijakan telah memberikan beberapa dampak positif pada kesejahteraan pedagang kaki lima, tantangan dalam perizinan usaha dan akses fasilitas pendukung masih menjadi kendala. Partisipasi aktif pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan terkait Sentral PKL juga memiliki perbedaan yang signifikan antar lokasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa implementasi Perda memberikan kontribusi positif pada sebagian pedagang kaki lima, namun perlu dilakukan penyesuaian dalam strategi implementasi untuk meningkatkan dampak yang lebih merata. Rekomendasi termasuk perbaikan dalam perizinan usaha, penguatan program pelatihan, dan peningkatan mekanisme partisipasi pedagang kaki lima dalam pengelolaan Sentral PKL.

4
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima dan memberikan sumbangan pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif serta inklusif di masa depan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Surabaya Regional Regulation Number 17 of 2004 concerning the Empowerment of Street Vendors at Gubeng PKL Central and Gayungan PKL Central. By focusing on economic and social aspects, this research evaluates the impact of empowerment policies on street vendor business conditions and their contribution to the local economy.

The research method used involves a case study with a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with street vendors, related stakeholders, and analysis of policy-related documents. In addition, surveys and field observations were carried out to obtain comprehensive data.

The research results show variations in the implementation of regional regulations between the Gubeng PKL Central and the Gayungan PKL Central. Although the policy has had some positive impacts on the welfare of street vendors, challenges in business licensing and access to supporting facilities are still obstacles. The active participation of street vendors in decision making regarding PKL Central also has significant differences between locations.

The conclusion of this research is that the implementation of the Regional Regulation has made a positive contribution to some street vendors, but adjustments need to be made in the implementation strategy to increase the impact more evenly. Recommendations include improvements in business licensing, strengthening training programs, and increasing mechanisms for street vendor participation in Central PKL management.

It is hoped that this research will provide deeper insight into the dynamics of implementation of street vendor empowerment policies and contribute to the development of more effective and inclusive policies in the future.

¹²
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

1. Latar Belakang

Latar belakang penelitian tentang implementasi Perda ¹⁶ Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan dapat dijelaskan ⁸⁹ sebagai berikut:

- a. **Tingginya Jumlah Pedagang Kaki Lima** :Pedagang kaki lima memiliki peran penting dalam perekonomian kota Surabaya. Jumlah pedagang kaki lima yang signifikan menunjukkan potensi besar untuk memberdayakan sektor ini.
- b. **Dukungan Regulasi Melalui Perda** :Adanya Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan pedagang kaki lima. Namun, perlu dievaluasi sejauh mana implementasinya dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang.
- c. **Varian Implementasi di Berbagai Lokasi**:Terdapat perbedaan dalam implementasi kebijakan antara Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang memengaruhi hasil implementasi di setiap lokasi.
- d. **Tantangan dan Peluang**:Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan lingkungan bisnis, diperlukan pemahaman mendalam

tentang dampak dan potensi perbaikan dalam ¹⁰⁷ implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima.

- e. **Kontribusi pada Kebijakan Publik:** Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada kebijakan publik dengan memberikan wawasan yang konkrit dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ¹⁰⁰ pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diarahkan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan tentang implementasi Perda Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di dua lokasi tersebut, serta memberikan sumbangan pada perbaikan kebijakan yang mendukung sektor ini secara lebih baik.

Dalam hal lain bahwa kemajuan Kota Surabaya dalam berbagai bidang sudah tidak diragukan lagi, pengembangan inovasi diberbagai sektor selalu digiatkan dan diperbarui, baik itu sektor industri, wisata, perdagangan, budaya, dan sektor kegiatan usaha. Terobosan dalam pelayanan khususnya disektor usaha membuat lini ini menjadi minat dan gairah tersendiri bagi masyarakat untuk turut serta membangun perekonomian di kota ini. Salah satu kemudahan yang difasilitasi oleh pemerintahan kota surabaya adalah pemberian ijin terhadap pelaku usaha hal yang sangat tepat, semua proses dari awal pendaftaran sampai ijin keluar dilakukan dengan transparansi, akuntabel dan durasi penerbitan yang relatif cepat menjadikan usaha-usaha mikro bertumbuh subur dalam berbagai bidang baik itu transportasi, ekonomi kreatif, tekhnologi serta kuliner.

Satu dasawarsa lalu disekitar surabaya dapat ditemui usaha kuliner begitu menjamur disurabaya, namun di era tersebut para pelaku masih belum mempunyai izin dan masih bertempat tidak teratur dan semestinya, mereka menjajakan usahanya diberbagai badan, bahu dan simpang jalan di berbagai sudut yang tidak memperhatikan segala sesuatunya baik itu penggunaan dan fungsi jalan, higienis makanan, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota (Pemkot) surabaya untuk melakukan penataan lebih baik agar segala sesuatunya dikembalikan sesuai dengan fungsinya.

Proses penataan terhadap usaha makanan dipinggir jalan yang basa dikatakan sebagai pedagang kaki lima (PKL) liar ini tidaklah mudah, karena beberapa kali dilakukan inspeksi, memberi peringatan sampai melakukan tindak pengusiran tidak membuat PKL menjadi ciut nyali untuk berjualan, malah sebaliknya mereka berbondong-bondong untuk tetap melapakkan dagangannya walau harus sering kali terjadi berurusan dengan petugas dari instansi berwenang. Melihat sulitnya mengatasi PKL liar ini pemerintah mulai melakukan evaluasi bahwasanya pengusiran bukanlah perlakuan yang tepat, sehingga langkah-langkah pendekatan secara persuasif dilakukan dan hal baru dalam penanganan yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap PKL yang ada.

Pembinaan tidak hanya sebatas melakukan arahan yang baik terhadap PKL, namun harus ada win-win solution bagi pelaku terkait, sehingga awal-awal harus dapat memfasilitasi para PKL untuk melakukan relokasi ke tempat yang telah disepakati bersama. Pemkot harus dapat menyediakan lahan serta membangun dengan layak agar menjadi minat bagi PKL untuk tidak lagi berjualan

dipinggir jalan, Pemkot tidak bisa berjalan sendiri berbagai pihak harus dilibatkan, baik dari segi tata ruang kota, lingkungan, pembangunan, ijin dan kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Penataan dilakukan bukan sekedar merelokasi namun harus dilihat ketepatan karena menyangkut jangka panjang kehidupan para PKL. Setidaknya mereka diberikan alternatif atau pilihan dengan adanya penyediaan tempat tersebut membuat PKL ada suatu harapan baru bagi mereka untuk dapat tetap beraktifitas dan berjualan.

Melihat fenomena tersebut peneliti ingin mendalami bagaimana kebijakan Pemkot Surabaya dalam menangani PKL kuliner liar hingga bisa menjadi tertib dan sampai terjadi icon atau trendmark baru yakni Sentra Wisata Kuliner (SWK) dengan hadirnya berbagai SWK di Surabaya ini membuat PKL lebih hidup dan masyarakat pecinta kuliner tidak lagi susah-susah untuk mencari makanan kesukaan terlebih segala aspek kebersihan, kesediaan tempat, kesehatan semua sudah terjamin, belum lagi dengan adanya hiburan khusus yang ada di SWK membuat masyarakat menjadi betah dalam berkunjung. Disisi lain Pemkot Surabaya mendapatkan feedback yang sesuai, dari pengenaan retribusi, pajak, dan dapat memberikan ijin usaha dagang sesuai yang telah ditetapkan perundangan.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam konteks penelitian implementasi Perda ¹⁶ Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dengan studi kasus di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sejauh mana penerapan Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 telah berdampak pada perizinan usaha dan keberlangsungan operasional pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan?
- b. Bagaimana fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah setempat, sebagaimana diatur dalam Perda, mempengaruhi peningkatan kondisi dan kesejahteraan pedagang kaki lima di kedua lokasi tersebut?
- c. Apakah pelatihan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Perda dan mampu meningkatkan keterampilan serta kapasitas pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan?
- d. Sejauh mana perlindungan hak-hak pedagang kaki lima dijamin oleh implementasi Perda tersebut, dan bagaimana hal ini tercermin dalam praktik sehari-hari di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan?

Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian dapat fokus pada evaluasi konkrit terhadap efektivitas kebijakan dan implementasinya, serta dampaknya terhadap kondisi dan kesejahteraan pedagang kaki lima di kedua lokasi tersebut.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian terkait implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan studi kasus di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Mengevaluasi Efektivitas Implementasi Perda:** Mengukur sejauh mana penerapan Perda ¹⁶ Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan.
2. **Menganalisis Dampak Perizinan Usaha :** Menilai dampak penerapan perizinan usaha yang diatur dalam Perda terhadap keberlangsungan operasional pedagang kaki lima di kedua lokasi tersebut.
3. **Menilai Fasilitas Pendukung:** Mengidentifikasi dan mengevaluasi fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan dalam Perda, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kondisi dan kesejahteraan pedagang.
4. **Mengevaluasi Efektivitas Pelatihan:** Mengukur efektivitas pelatihan yang diberikan kepada pedagang kaki lima, sesuai dengan ketentuan dalam Perda, ¹⁰⁵ dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka.
5. **Menganalisis Perlindungan Hak-hak Pedagang:** Menilai sejauh mana perlindungan hak-hak pedagang kaki lima dijamin oleh implementasi Perda, dan bagaimana hal ini tercermin dalam praktik sehari-hari.
Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian ³ diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kebijakan dan implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

C. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan memiliki beberapa manfaat signifikan:

1. **Kontribusi pada Kebijakan Publik** : Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di tingkat daerah. Rekomendasi hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki atau mengoptimalkan implementasi kebijakan.
2. **Pemahaman Mendalam tentang Implementasi Kebijakan** : Memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima diimplementasikan di dua lokasi berbeda. Ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan kebijakan.
3. **Dampak pada Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima** : Menilai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima. Hasil penelitian dapat memberikan informasi yang berharga tentang peningkatan atau perubahan dalam kondisi ekonomi dan sosial mereka.
4. **Pengembangan Model Pemberdayaan** : Membantu dalam pengembangan model pemberdayaan pedagang kaki lima yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ini bisa mencakup penyempurnaan kebijakan, program pelatihan, atau pengelolaan Sentral PKL.

5. **Basis untuk Penelitian Lanjutan** : Menyediakan dasar untuk penelitian lanjutan terkait kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima atau topik sejenis. Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk studi komparatif atau analisis lebih mendalam.
6. **Pemberdayaan Komunitas Lokal** : Memiliki potensi untuk meningkatkan pemberdayaan komunitas lokal dengan memperbaiki kondisi pedagang kaki lima. Peningkatan kesejahteraan mereka dapat berdampak positif pada ekosistem bisnis lokal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Surabaya, sekaligus berpotensi memberikan dampak positif pada tingkat sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

D. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis adalah bagian penting dari sebuah thesis yang memberikan dasar konseptual dan teoretis bagi penelitian. Dalam kajian teoritis mengenai implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, beberapa aspek kunci yang dapat dicakup dalam kerangka teoritis adalah:

1. **Pemberdayaan Ekonomi**: Memahami teori-teori pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam konteks pedagang kaki lima. Menganalisis bagaimana kebijakan pemberdayaan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.

2. **Inklusi Sosial:** Membahas konsep inklusi sosial dan bagaimana implementasi Perda dapat mempromosikan partisipasi dan integrasi pedagang kaki lima dalam kehidupan sosial masyarakat.
3. **Teori Implementasi Kebijakan:** Menyelidiki teori-teori implementasi kebijakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Faktor-faktor tersebut dapat melibatkan aktor-aktor, proses, dan konteks lokal.
4. **Peran Pedagang Kaki Lima dalam Ekonomi Lokal :** Melibatkan teori-teori tentang peran pedagang kaki lima dalam menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan akses produk dan layanan bagi masyarakat.
5. **Evaluasi Kebijakan:** Memahami teori-teori evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas implementasi Perda. Mengidentifikasi indikator kinerja dan dampak yang relevan.
6. **Teori Pemberdayaan Masyarakat:** Menyelidiki teori-teori pemberdayaan masyarakat dan menerapkannya pada konteks pedagang kaki lima. Bagaimana kebijakan dapat meningkatkan kapasitas dan kontrol pedagang kaki lima terhadap lingkungan usaha mereka.
7. **Teori-teori Pendukung:** Mengintegrasikan teori-teori terkait seperti teori partisipasi, teori perubahan sosial, dan teori keadilan sosial yang mendukung pemahaman lebih baik terhadap implementasi Perda dan dampaknya.

Pastikan kajian teoritis ini memberikan kerangka konseptual yang kokoh untuk penelitian Anda dan mendukung identifikasi masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian. Juga, hubungkan teori-teori tersebut dengan konteks lokal dan karakteristik unik Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan.

Dalam penelitian implementasi Perda ¹⁶ Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, ada beberapa pendekatan teori yang dapat digunakan termasuk:

1. **Teori Pemberdayaan (Empowerment):** Menggunakan teori pemberdayaan untuk menganalisis sejauh mana Perda dan implementasinya memberdayakan pedagang kaki lima, dengan fokus pada peningkatan kapasitas, kontrol, dan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi.
2. **Teori Kebijakan Publik:** Memanfaatkan kerangka teori kebijakan publik untuk memahami pembentukan, implementasi, dan dampak kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta mengevaluasi peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan pedagang.
3. **Teori Sosial:** Menerapkan teori sosial untuk menganalisis interaksi dan hubungan antara pedagang kaki lima, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam konteks implementasi Perda.
4. **Teori Keadilan dan Hak Asasi Manusia:** Menggunakan teori ini untuk menilai sejauh mana perlindungan hak-hak pedagang kaki lima dijamin oleh Perda dan apakah implementasinya sesuai ⁹⁸ dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

5. **Teori Inovasi:** Menerapkan teori inovasi untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Perda mendorong inovasi dalam model bisnis pedagang kaki lima dan apakah ada praktik inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemilihan pendekatan teori ini bergantung pada fokus penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian secara keseluruhan. Integrasi beberapa pendekatan teori dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap dan komprehensif terhadap konteks yang diteliti.

E. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang baik dan sistematis penting untuk memastikan kehandalan dan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian mengenai implementasi Perda ¹⁶ Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, berikut adalah kerangka metodologi penelitian yang bisa anda pertimbangkan:

1. ⁸² **Desain Penelitian:** Pilih desain penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, ¹¹⁰ seperti studi kasus, eksploratif, atau deskriptif. Karena penelitian ini bersifat deskriptif dan evaluatif, desain studi kasus mungkin cocok.
2. **Pemilihan Sampel:** Pilih sampel yang representatif dari pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan. Berikan alasan yang jelas untuk pemilihan sampel, serta teknik pengambilan sampel yang digunakan.

3. **Instrumen Pengumpulan Data:** Tentukan instrumen ⁵⁰ pengumpulan data yang sesuai, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Pastikan instrumen tersebut dapat mengukur variabel-variabel yang relevan dengan tujuan penelitian.
4. **Prosedur Pengumpulan Data:** Jelaskan secara rinci bagaimana data akan dikumpulkan. Tentukan apakah akan ada wawancara langsung, survei online, atau observasi langsung di lapangan. Pastikan bahwa prosedur ini konsisten di seluruh lokasi penelitian.
5. **Analisis Data:** Tentukan ⁴ metode analisis data yang akan digunakan, seperti analisis statistik, content analysis, atau teknik analisis kualitatif. Pastikan bahwa metode ini sesuai dengan jenis data yang Anda kumpulkan dan pertanyaan ⁷⁹ penelitian.
6. **Validitas dan Reliabilitas:** Rencanakan langkah-langkah ⁷⁹ untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Misalnya, gunakan instrumen yang telah diuji validitasnya, dan lakukan uji reliabilitas jika memungkinkan.
7. **Evaluasi dan Interpretasi Hasil:** Jelaskan bagaimana hasil akan diinterpretasikan dan dievaluasi. Tentukan kriteria sukses atau kegagalan implementasi Perda dan jelaskan implikasi hasil terhadap kebijakan dan praktik di lapangan.
8. **Etika Penelitian:** Pastikan bahwa penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk hak privasi peserta dan integritas data.

9. **Rencana Jadwal Penelitian:** Tetapkan jadwal penelitian yang realistis dan tentukan waktu yang diperlukan untuk setiap langkah dalam metodologi. Pastikan bahwa jadwal ini memungkinkan waktu yang cukup untuk analisis dan interpretasi data.
10. **Pengelolaan Risiko dan Keterbatasan:** Identifikasi potensi risiko dan keterbatasan penelitian, serta rencanakan strategi untuk mengatasi atau meminimalkan dampaknya.

Dengan merancang metodologi penelitian yang cermat, anda dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan hasil penelitian yang valid dan memberikan kontribusi yang bermanfaat pada pemahaman mengenai implementasi Perda Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

F. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Dalam konteks penelitian implementasi Perda ¹⁶ Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, tahap implementasi, pembahasan, dan analisis dapat melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Implementasi** : Identifikasi dan dokumentasikan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah setempat untuk mengimplementasikan Perda, termasuk pembuatan kebijakan dan peraturan pelaksana, serta pelaksanaan program-program pemberdayaan.
2. **Pembahasan:** Diskusikan hasil wawancara, observasi, atau data yang diperoleh untuk memahami bagaimana pedagang kaki lima dan pemerintah

setempat melihat dan mengalami implementasi Perda. Identifikasi potensi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi dan bagaimana pihak terkait mengatasinya.

3. **Analisis:** Lakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan, terfokus pada sejauh mana efektivitas implementasi Perda dalam mencapai tujuan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan evaluasi dampak positif dan negatif yang timbul dari implementasi Perda, termasuk perubahan dalam kondisi usaha, kesejahteraan pedagang, dan dinamika pasar di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan.
4. **Perbandingan Studi Kasus:** Bandingkan temuan dari Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, atau pola yang muncul dalam implementasi Perda di dua lokasi tersebut.
5. **Rekomendasi:** Berikan rekomendasi yang didasarkan pada temuan dan analisis. Rekomendasikan perbaikan atau peningkatan dalam implementasi Perda, serta saran untuk mendukung pemberdayaan pedagang kaki lima secara lebih efektif.

Melalui langkah-langkah ini, penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima dan memberikan dasar untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan.

¹² BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian mengenai implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan dapat mencakup beberapa aspek kunci:

- ¹⁶ **Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima:** Pemahaman tentang kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima baik di tingkat nasional maupun internasional. Analisis terhadap jenis-jenis kebijakan yang telah diterapkan dan dampaknya pada kesejahteraan pedagang kaki lima.¹³
- Peran Pedagang Kaki Lima dalam Ekonomi Lokal:** Studi mengenai kontribusi pedagang kaki lima dalam membangun ekonomi lokal, termasuk peran mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan akses produk dan layanan, dan peran sosial mereka dalam komunitas.
- Implementasi Kebijakan Daerah:** Analisis tentang implementasi kebijakan daerah, khususnya dalam konteks Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004. Memahami tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan di tingkat lokal.
- Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan:** Tinjauan tentang metodologi evaluasi kebijakan pemberdayaan, termasuk indikator yang relevan untuk mengukur keberhasilan dan dampaknya terhadap pedagang kaki lima.
- ¹³ **Faktor Lokal yang Mempengaruhi Implementasi:** Menelaah faktor-

faktor lokal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti karakteristik pasar, kondisi sosial ekonomi, dan hubungan antara pedagang kaki lima dengan pemerintah lokal.

6. **Studi Kasus Implementasi Kebijakan Serupa:** Menyelidiki studi kasus implementasi kebijakan serupa di lokasi lain. Menarik perbandingan dengan Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan untuk mengevaluasi keberhasilan dan perbedaan implementasi.

Bahwa tinjauan pustaka ini akan memberikan landasan teoritis dan kontekstual yang kuat untuk penelitian, membantu mengidentifikasi celah pengetahuan, dan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis hasil penelitian secara lebih mendalam.

A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Kebijakan Publik

Amir Santoso¹⁰ dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik (*publik policy*) menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori:

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik¹. Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang

masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat akibat yang bisa diramalkan². Para ahli yang termasuk kedalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian³. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan⁴. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian intruksi dari para pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut⁵. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi kondisi awal dan akibat - akibat yang bisa diramalkan⁶.

¹Budi Winarmo, 2012, KEBIJAKAN PUBLIK Teori, Proses, dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta, hlm. 22

²Budi Winarmo, 2012, KEBIJAKAN PUBLIK Teori, Proses, dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta, hlm. 22

³Budi Winarmo, 2012, KEBIJAKAN PUBLIK Teori, Proses, dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta, hlm. 22

⁴Budi Winarmo, 2012, KEBIJAKAN PUBLIK Teori, Proses, dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta, hlm. 22

⁵Budi Winarmo, 2012, KEBIJAKAN PUBLIK Teori, Proses, dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta, hlm. 22

⁶Budi Winarmo, 2012, KEBIJAKAN PUBLIK Teori, Proses, dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta, hlm. 22

Namun demikian di Indonesia istilah *public policy* itu sendiri masih belum mendapatkan terjemahan yang pasti. Kita dapat temui beberapa istilah *public policy* yakni Kebijakan Umum, Kebijakan pemerintah, kebijakan Publik, Kebijakan Negara, Kebijakan Publik dan lain sebagainya⁷. *public policy* merupakan hasil kegiatan politik, dimana dalam kegiatan tersebut hal yang penting dan utama adalah pengambilan keputusan (decision making)⁸.

2. Kebijakan Publik dan Politik Demokratik

Studi kebijakan publik sebagai proses politik yang berorientasi pada akomodasi kepentingan publik, pada saatnya harus bersinggungan dengan erat dengan konsep demokrasi⁹. Sebab tanpa persinggungan ini bukan tidak mungkin kebijakan publik justru akan meminggirkan kepentingan publik itu sendiri¹⁰. Dan dengan demikian ia menjadi alat bagi kekuasaan yang ada di sebuah bangsa untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dan manipulatif untuk kepentingan sedikit orang¹¹.

⁷Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

⁸Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

⁹Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

¹⁰Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

¹¹Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

³⁰ Kebijakan publik pada posisi ini hanya dimiliki segelintir orang, dan keuntungan dari produk politik (yang mengatasnamakan banyak orang) itu pun tidak berimbas pada keseluruhan masyarakat¹². Secara konseptual studi kebijakan publik yang tidak bersinggungan dengan konsep demokrasi ini sering disebut istilah *iron cage* atau ada pula yang menyebutnya dengan *iron trangle*¹³. Secara lebih eksplisit Jaques Ellul melontarkan kritik terhadap analisis kebijakan publik yang menurutnya dapat melemahkan demokrasi, sebab analisis kebijakan cenderung akan dikuasai oleh pakar analisis kebijakan¹⁴.

³ Keunggulan dari kebijakan publik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi adalah kebijakan publik yang dihasilkan itu akan memiliki basis legitimasi yang kuat¹⁵. Sebab dengan adanya demokrasi dalam sebuah kebijakan publik maka semua elemen dalam masyarakat merasa memiliki atas kebijakan itu. Kebijakan publik itu mampu mengakomodasi semua kepentingan dan prefensi dalam masyarakat, sehingga basis legitimasi dari kebijakan publik itu sangat kuat, di samping itu kebijakan publik yang demokratis juga memiliki kelebihan yaitu lebih mudah diimplementasikan¹⁶.

¹²Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

¹³Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

¹⁴Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

¹⁵Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

¹⁶Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

³⁵ Hal ini disebabkan karena dukungan politik (*political support*) dari kebijakan yang diambil itu kuat, dengan kuatnya dukungan itu maka saat kebijakan itu diimplementasikan maka akan sedikit sekali pihak-pihak yang menentangnya, sehingga proses implementasi akan berjalan dengan baik sebab sedikit sekali adanya gangguan¹⁷.

3. Tahap - Tahap Kebijakan

¹³ Proses Pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap - tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut¹⁸:

Gambar II.1
Tahap tahap kebijakan



¹⁷Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 50

¹⁸Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 35

4. Tahap Penyusunan Agenda

Para Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan - alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama¹⁹.

Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Untuk menjawab hal ini David Truman menyatakan bahwa kelompok-kelompok berusaha mempertahankan diri dalam keadaan equilibrium (keseimbangan) yang layak, dan jika sesuatu mengancam kondisi ini, maka mereka akan bereaksi untuk melakukan penyesuaian diri²⁰. suatu contoh isu mengenai rendahnya upah minimum regional di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang naik dengan cepat, hal ini akan mendorong kelompok buruh mendesak pemerintah untuk menaikkan upah tersebut. Konsep equilibrium yang ditawarkan oleh Truman ini hanya dapat menjelaskan seandainya dis-equilibrium terjadi dalam kelompok.

¹⁹ Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 36

²⁰ Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 36

²² Namun, konsep ini tidak mampu menjelaskan peran elit politik dalam mendorong suatu isu masuk ke dalam agenda kebijakan²¹. Padahal, seperti yang diungkapkan oleh Nelson, suatu proses agenda kebijakan terjadi sebagai hasil “belajar” elite politik²².

⁴⁴ A. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada²³. David Easton menawarkan suatu model sistem dalam perumusan kebijakan. Menurut model sistem, kebijakan publik merupakan hasil dari suatu sistem politik²⁴. Konsep “sistem” itu sendiri menunjuk pada seperangkat lembaga dan kegiatan yang dapat diidentifikasi dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan - tuntutan (*demands*) menjadi keputusan - keputusan yang otoritatif²⁵. Konsep “sistem” juga menunjukkan adanya hubungan timbal - balik antara elemen - elemen yang membangun sistem politik serta mempunyai

²¹ Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 36

²² Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 99

²³ Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 99

²⁴ Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 99

²⁵ Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 99

⁸ kemampuan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungannya (*internal* dan *external environments*), masukan-masukan diterima oleh sistem politik dalam bentuk tuntutan-tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*)²⁶ Tuntutan-tuntutan timbul bila individu atau kelompok-kelompok di luar sistem politik memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan publik. Kelompok-kelompok ini secara aktif berusaha mempengaruhi kebijakan publik²⁷. Sedangkan dukungan (*supports*) bisa berupa sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh sistem politik, dan dukungan politik dari individu-individu atau kelompok-kelompok atau dengan cara mereka menerima hasil-hasil pemilihan-pemilihan, mematuhi undang-undang, membayar pajak dan secara umum mematuhi keputusan-keputusan kebijakan²⁸.

²⁴ Untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian-penyelesaian ini pada pihak-pihak yang bersangkutan²⁹.

²⁶Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 36

²⁷Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 99

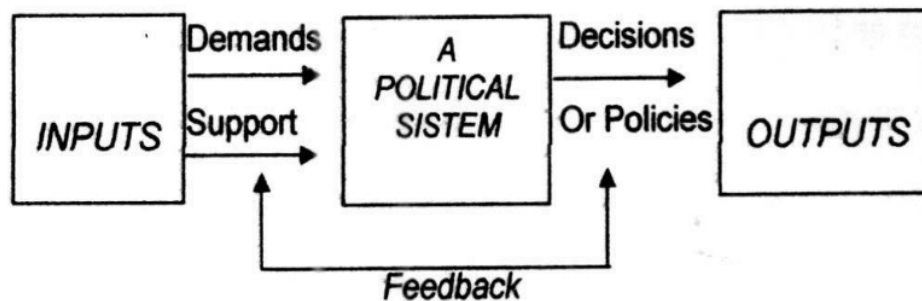
²⁸Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 99

²⁹Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 99

Oleh karena suatu sistem dibangun berdasarkan elemen-elemen yang mendukung sistem tersebut dan hal ini bergantung pada interaksi antar beberapa subsistem, maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yakni: pertama, menghasilkan outputs yang secara layak memuaskan; kedua, menyandarkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri, dan ketiga, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan (penggunaan otoritas)³⁰.

Gambar II.2

Kerangka Kerja Sistem yang Dikembangkan oleh Easton



B. Tahap-Tahap dalam Perumusan Kebijakan

- a. **Perumusan Masalah (Defining Problem):** Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik³¹.

³⁰ Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 100

³¹ Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 123

- b. ³² **Agenda Kebijakan:** Suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat - syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan³².
- c. **Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah:** Setelah masalah masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. ²⁸ Pada tahap ini perumus kebijakan akan dihadapkan ada pertarungan kepentingan antar berbagai actor yang terlibat dalam perumusan kebijakan³³.
- d. **Penetapan Kebijakan :** Setelah salah satu dari sekian alternative kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa Undang Undang, yurisprudensi, keputusan Presiden, Keputusan - keputusan Menteri dan lain sebagainya³⁴.

³² Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 100

³³ Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 124

³⁴ Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 125

C. Aktor-Aktor dalam Perumusan Kebijakan

³⁷ Aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi adalah agen agen pemerintah (birokrasi), Presiden (eksekutif), legislative, dan yudikatif³⁵. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok pemeran serta tidak resmi meliputi; kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga actor yang berpartisipasi negara individu. dalam penetapan UMK actor dalam perumusan kebijakan dapat dikategorikan sebagai kelompok kepentingan³⁶. Pengaruh ⁸ kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan tergantung pada banyak faktor yang menyangkut ukuran - ukuran keanggotaan kelompok, keuangan dan sumber-sumber lain, kepaduannya, kecakapan dari orang yang memimpin kelompok tersebut, ada tidaknya persaingan organisasi, tingkah laku para pejabat pemerintah dan tempat pembuatan keputusan dalam sistem politik³⁷. Selain itu, pengaruh kelompok kepentingan dalam pembuatan keputusan ditentukan pula oleh pandangan yang ditujukan terhadap kelompok tersebut. Suatu kelompok yang dianggap baik dan besar akan cenderung efektif dalam mempengaruhi keputusan kebijakan dibanding dengan kelompok yang dipandang sebaliknya.

³⁵Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 100

³⁶Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 131

³⁷Fadillah Putra, 2003, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003), Pustaka Pelajar Offset dan Averroes Press, Malang, hlm. 131

³³ **a. Tahap Adopsi Kebijakan:** Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. ⁷⁷ William R. Dill memberikan definisi suatu keputusan adalah suatu pilihan terhadap pelbagai alternative". namun demikian pembuatan keputusan ¹³ bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan kesalahan umum didalamnya seperti pendapat ⁶⁸ Nigro and Nigro, beberapa faktor yang mempengaruhi adalah :

¹³ 1) Adanya pengaruh dan tekanan-tekanan dari luar

Seringkali administrator harus membuat keputusan karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan nama "rational comprehensive" yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternative alternative yang akan dipilih berdasarkan penilaian "rasional" semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan tersebut tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya.

b. Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama (Konservatisme): Kebiasaan lama ¹⁴ organisasi seperti kebiasaan investasi modal, Kebiasaan kebiasaan lama tersebut seringkali diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para

pendahulunya.

- c. **Adanya Pengaruh Sifat-sifat Pribadi:** Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi sifat-sifat pribadinya. seperti misalnya dalam proses penerimaan / pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali.
- d. **Adanya Pengaruh Dari Kelompok Luar:** Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Seperti contoh mengenai masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang menaruh respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan mereka. Seringkali juga pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan.
- e. **Adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu:** Pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Seperti misalnya orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggungjawabnya kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan.

⁶ Kesalahan-kesalahan umum sering terjadi dalam proses pembuatan keputusan, Nigro & Nigro menyebutkan ada 7 (tujuh) macam kesalahan-kesalahan umum itu, yaitu:

- a. **Cara Berfikir Yang Sempit:** Adanya kecenderungan manusia membuat keputusan hanya untuk memenuhi kebutuhan seketika sehingga melupakan antisipasi ke masa depan. Dan adanya lingkungan pemerintahan yang beraneka ragam telah menyebabkan pejabat pemerintah sering membuat keputusan dengan dasar-dasar pertimbangan yang sempit dengan tanpa mempertimbangkan implikasinya ke masa depan. Seringkali satu aspek pembuat keputusan hanya mempertimbangkan permasalahan saja dengan melupakan kaitannya dengan aspek aspek lain, sehingga gagal mengenali problema secara keseluruhan.
- b. **Adanya Asumsi Bahwa Masa Depan Akan Mengulangi Masa Lalu:**
¹⁵ Banyak anggapan yang menyatakan bahwa dalam suatu masa yang stabil orang akan bertingkah laku sebagaimana para pendahulunya di masa lampau.⁶ Padahal di dalam membuat keputusan para pejabat pemerintah tersebut harus meramalkan keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang akan datang yang berbeda dengan masa lampau.
- c. **Terlalu Menyederhanakan Sesuatu:** Selain adanya kecenderungan untuk berfikir secara sempit, ada untuk terlampau pula kecenderungan pembuat keputusan menyederhanakan sesuatu. Misalnya dalam melihat suatu masalah pembuat keputusan hanya mengamati gejala-gejala masalah tersebut saja dengan tanpa mencoba mempelajari secara mendalam apa sebab-sebab timbulnya masalah tersebut.

- d. Terlampau Menggantungkan Pada Pengalaman Satu Orang:** Pada umumnya banyak orang meletakkan bobot yang besar pada pengalaman mereka diwaktu yang lalu dan penilaian besar pada pengalaman mereka, walaupun seorang pejabat yang berpengalaman akan mampu membuat keputusan keputusan yang lebih baik dibanding dengan yang tidak berpengalaman, tetapi mengandalkan pada pengalaman dari seorang saja bukanlah pedoman yang terbaik.
- e. Keputusan-keputusan yang Dilandasi oleh Pra Konsepsi :** Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan sering dilandaskan pada prakonsepsinya pembuat keputusan. Hal ini tidak terlalu salah tetapi jelas tidak jujur. Keputusan keputusan administrative akan lebih baik hasilnya kalau didasarkan pada penemuan-penemuan ilmu sosial.
- f. Tidak Adanya Keinginan Untuk Melakukan Percobaan:** Cara untuk mengetahui apakah suatu keputusan itu dapat diimplementasikan atau tidak adalah dengan mengetesnya secara nyata pada ruang lingkup kecil. Adanya tekanan waktu, pekerjaan yang menumpuk dan sebagainya menyebabkan pembuat keputusan tidak mempunyai kesempatan melakukan proyek percobaan.
- g. Keengganan Untuk Membuat Keputusan:** Kendatipun mempunyai cukup fakta fakta beberapa orang enggan untuk membuat keputusan. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap membuat keputusan itu sebagai tugas yang sangat berat, penuh resiko, bisa membuat orang frustrasi, kurang adanya dukungan dari lembaga atau atasan terhadap atau atasan terhadap tugas pembuat keputusan, lemahnya sistem pendelegasian wewenang

untuk membuat keputusan, takut menerima kritikan dari orang lain atas keputusan yang telah dibuat.

Selain itu James Anderson,¹² meringkas nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan kedalam beberapa kategori, yakni:

- a. **Nilai-nilai Politik:** Pembuat Keputusan (decision marker) mungkin menilai alternative alternative kebijakan berdasarkan pada kepentingan partai politiknya beserta kelompoknya (clientele group). Keputusan yang dibuat didasarkan pada keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok kepentingan.
- b. **Nilai-nilai organisasi:** Para pembuat keputusan, khususnya para birokrat mungkin dipengaruhi pula oleh nilai-nilai organisasi. Organisasi-organisasi, seperti badan-badan administrative menggunakan banyak imbalan (reward) dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota-anggotanya menerima dan bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan.
- c. **Nilai-nilai Pribadi:** Usaha untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi atau kedudukan sejarah seseorang mungkin pula merupakan kriteria keputusan.
- d. **Nilai-nilai Kebijakan:** Para pembuat keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan keuntungan, organisasi-organisasi atau pribadi, namun para pembuat keputusan mungkin bertindak dengan baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat atau kepercayaan mengenai apa yang merupakan kebijakan publik secara moral benar atau pantas.

e. Nilai-nilai Ideologi: Ideologi merupakan seperangkat nilai nilai dan kepercayaan kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran dunia yang disederhanakan dan merupakan pedoman bagi rakyat untuk melakukan tindakan.

D. Model Pembuatan Keputusan Kaufman

Model Kaufman memiliki pemanfaatan yang luas terhadap pemahaman pembuatan keputusan dalam konteks mikro maupun makro. Modelnya mengadopsi teori-teori psikologi kognitif (cognitive psychology) dan teori organisasional (organizational theory) serta kajian-kajian tentang konflik, karenanya pertama-tama Kaufman mengemukakan isi informative utama dari sebuah keputusan.

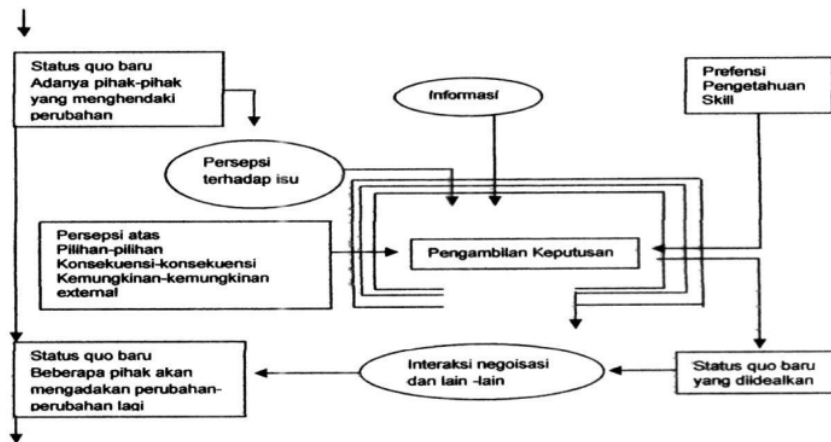
Faktor-faktor seperti nilai, budaya, tradisi dan pengetahuan pembuat keputusan, pilihan yang dirasakan menyangkut cara-cara tindakan, waktu, alokasi sumber serta teman dan lawan policy makers dan kejadian-kejadian eksternal, merupakan faktor-faktor yang melingkupi proses kebijakan". Oleh karena itu, proses pembuatan keputusan merupakan konteks organisasi dan lingkungan, dengan lapisan-lapisan terbentuknya.

Pertimbangan individual dan pemecahan masalah kelompok formasi koalisi dan persuasi terjadi dalam lingkungan internal organisasi, sebaliknya organisasi-organisasi ini berada dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga politik, kelompok kepentingan dan lingkungan secara luas⁷⁹. Akhirnya policy makers mengambil keputusan berdasarkan kejadian-kejadian serta ramalan-

ramalan dan hasil negoisasi yang dilakukan berlapis-lapis. Kaufman meletakkan model lingkungan pembuat keputusan dan isi nirmatif pembuat keputusan secara bersama-sama dalam satu model sebagai berikut:

Gambar II.3

Pengambilan Keputusan dan Manajemen Konflik



Dari model di atas, Kaufman mengingatkan bahwa, *policy makers* dapat menyeret dalam keadaan apapun, hal-hal seperti preferensi, pengetahuan, keahlian atau akses ke sumber-sumbernya, bisa saja mendukungnya untuk membentuk persepsi tentang isu-isu yang bakal dihadapi perkembangannya, atau isu-isu yang bakal dipertahankan keberadaannya, bisa saja tetap berada dalam situasi teddy bear policy atau sebaliknya menegosiasikan keputusan kebijakan yang akan diambil kepada mereka yang bakal dikenai kebijakan (target group) serta stakeholders kebijakan. Kelebihan model Kaufman ini adalah menampilkan bentuk analisis pembuatan keputusan sebagai sesuatu yang terjadi dalam keadaan konflik antara stakeholders yang berbeda informasi, persepsi dan lingkungan yang berbeda pula.

E. Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Goerge C. Edwards²⁵ implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan secara baik. sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami suatu kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Ada 4 (empat) faktor atau variable dalam implementasi kebijakan menurut Edwards yaitu, Komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan⁴³ atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Oleh karena empat faktor ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut.

- a. **Komunikasi**¹² : Secara Umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni, Faktor Pertama⁵⁵ yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi.

- 2) Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan.
- 3) Informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi.
- 4) Persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Faktor Kedua yang dikemukakan Edwards adalah Kejelasan. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk - petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Edwards mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan yakni :

- 1) Kompleksitas kebijakan publik.
- 2) Keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat.
- 3) Kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan.
- 4) Masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru.
- 5) Menghindari pertanggungjawaban kebijakan.
- 6) Sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan

mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

1) **Sumber-sumber**

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

Sumber-sumber yang penting meliputi:

a) **Staf**

Suatu masalah besar yang sering timbul adalah menyangkut pembatasan pembatasan dalam memantau kegiatan kegiatan pelaksanaan dari personil-personil lain atau dalam mengatur perilaku. Apakah itu yang diatur individu individu swasta atau organisasi organisasi atau tingkat pemerintahan yang lain, seringkali dijumpai staf yang kurang memadai baik dari segi jumlah maupun keterampilan untuk melakukan pekerjaan.

- 2) **Informasi:** Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

- 3) **Wewenang:** ²⁷ Wewenang merupakan sumber lain yang penting dalam implementasi kebijakan. Wewenang ada dalam banyak bentuk, dari member bantuan sampai memaksakan perilaku. Wewenang yang memadai seringkali langka terutama dalam hal mengatur personil - personil lain. Kadang-kadang wewenang itu tidak ada bahkan di atas kertas sekalipun (wewenang formal).
- 4) **Kecenderungan-kecenderungan:** ¹⁷ Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi konsekuensi penting bagi implementasi yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

F. STRUKTUR BIROKRASI

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

¹⁹ Ripley dan Fanklin berdasarakan pengamatan yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasi enam karkter birokrasi, yakni:

- a. Birokrasi dimanapun berada, dipilih sebagai instrument sosial yang ditujukan untukmenangani masalah-masalah yang diidentifikasi sebagai urusan publik.
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program yangdominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks.
- e. Birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi.
- f. Birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakanmereka, tidak juga secara penuh di control oleh kekuatan-kekuatan yang berasal di luar dirinya

G. TAHAP EVALUASI KEBIJAKAN

⁴⁷ Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Menurut Lester dan Steward, evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan menggambarkan dampaknya,

sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau criteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak meraih dampak yang diinginkan.

Untuk memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (specification), pengukuran (measurement), analisis, dan rekomendasi. Spesifikasi merupakan kegiatan yang paling penting diantara kegiatan yang lain dalam evaluasi kebijakan.

Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Ukuran - ukuran atau kriteria - kriteria inilah yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan". Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan dan akhirnya, rekomendasi, yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

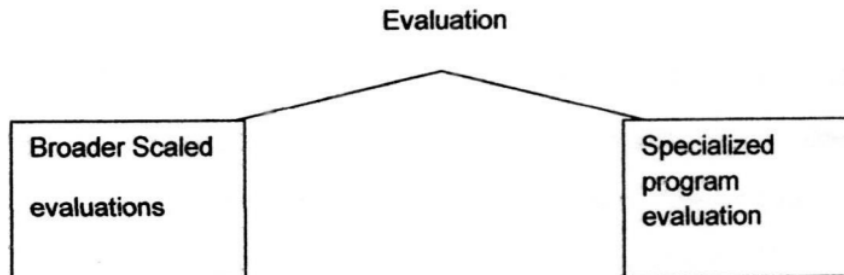
Charles O. Jones juga mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dipersiapkan dan ditujukan untuk menilai mutu dan keberhasilan program pemerintah yang terutama sekali terdiri dari kegiatan kegiatan pemilah - pemilah objek, cara pengukuran dan metode analisa. Kegiatan itu dapat terjadi di semua tingkat pemerintahan dan dapat pula terjadi dilakukan oleh rakyat yang terdiri dari orang-orang dengan berbagai macam pengalaman, pendidikan dan sikap serta perilakunya yang berbeda. Dari apa yang dikemukakan dapatlah disimpulkan

bahwa evaluasi itu dapat dilakukan dengan dibedakan secara umum menjadi dua bentuk yaitu:

- a. **Dilakukan Secara Tehnis-Rasional (Ilmiah):** Kegiatan evaluasi ini seperti yang di kemukakan sebelumnya diatas adalah specification, measurement, analysis dan recommendation. Evaluasi ini lebih bersifat rasional, serta dilakukan terutama oleh orang-orang atau pejabat-pejabat yang terlibat dan mereka lebih terikat dan bertanggung jawab atas keberhasilan. Evaluasi inilah yang disebut Jones sebagai "specialized evaluation" Hasil dari evaluasi oleh orang diluar pejabat yang terikat, seringkali merupakan konsepsi-konsepsi usulan untuk "reformulation". Sedangkan apabila kesempatan itu tidak ada, maka yang diajukan adalah kritik-kritik yang merupakan partisipasi masyarakat.
- b. **Dilakukan secara Umum:** Evaluasi dilakukan secara umum yang dilakukan oleh rakyat dengan berbagai macam kepentingan serta tingkat pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Dalam evaluasi ini, sering terjadi titik berat (stress) penilaian yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dan kelompok yang lain. Evaluasi inilah yang disebut sebagai "broader scaled evaluation" evaluasi ini sangat bersifat politis hasil yang ditimbulkan bisa berwujud dukungan, tuntutan dan pergantian, terlebih dapat terjadi pencabutan kebijakan sebelum dilaksanakan.

Gambar 11.4

Evaluasi Charles O Jones



H. MONITORING KEBIJAKAN

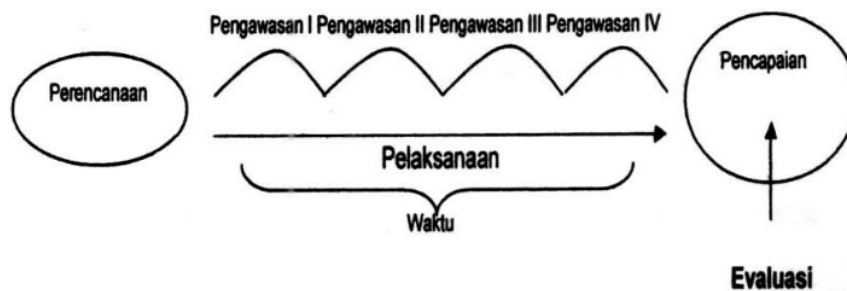
Monitor adalah "to watch and chek over a period of time", menurut Kunarjo monitoring atau pemantauan adalah usaha secara terus-menerus untuk memahami perkembangan bidang-bidang tertentu dari pelaksanaan tugas atau proyek yang sedang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan / kesalahan / keterlambatan, sehingga dapat diluruskan.

- a. Memastikan proses implementasi sesuai dengan model implementasi sesuai dengan model implementasi yang sesuai.
- b. Memastikan bahwa implementasi kebijakan menuju arah kinerja kebijakan yang dikehendaki.

Tujuan monitoring hanya dua, yaitu memastikan pelaksanaan tidak menyimpang dari perencanaan, dan membangun early warning system sebagai bagian penting untuk memastikan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Kebijakan tentang pemantauan kebijakan dapat dibangun secara generic, sebagai suatu standar pemantauan, dan masing-masing lembaga mengembangkan lebih lanjut model yang sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan.

⁵ Model monitoring, secara generik digambarkan sebagai sekuensi antara perencanaan dan evaluasi, dengan demikian, sebenarnya monitoring dapat disebut "bagian-bagian" dari evaluasi, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.5
Standar Pengawasan



⁵ Pengawasan yang baik dapat secara langsung menjadi evaluasi. Dengan demikian, evaluasi merupakan agregasi dan penyimpulan dari pengawasan-pengawasan yang dilakukan. Dengan demikian terjadi "sinergi" optimum antara "pengawasan" dan "evaluasi" sehingga tidak perlu terjadi pengulangan proses dan pekerjaan.

Masalah kita adalah pertama, Kita tidak cukup memahami monitoring, Kedua, tidak cukup memahami evaluasi. Ketiga, tidak dapat membedakan antara monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, monitoring acap kali tumbuh dengan evaluasi. Misalnya teramat sering kita dengar pimpinan birokrasi terbiasa dengan "singkatan-majemuk" MONEV. Implikasinya setiap monitoring harus dilanjutkan dengan evaluasi. Padahal tidak selalu demikian. Ada monitoring yang khusus hanya untuk early warning system, tidak untuk arah ke evaluasi, Padahal,

lazimnya harus berbeda. Bahkan, untuk evaluasi khusus, diperlukan tim khusus yang bukan dari lembaga tersebut, dalam rangka memberikan hasil evaluasi yang fair. Masalah lain adalah, karena terbiasa dengan kata "MonEv" ukuran monitoring secara "sembrono" disamakan dengan ukuran evaluasi.

Metode pemonitor biasanya dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Model survey ke lapangan.
- b. Model pemanfaatan ahli melalui model delphi ataupun diskusi kelompok terfokus.
- c. Pengawasan di balik meja (disk monitoring) dengan memanfaatkan metode triangulasi, baik triangulasi data maupun triangulasi teori.

Dalam melakukan monitoring, setidaknya ada empat hal yang harus menjadi catatan pemonitor, yaitu:

- a. Proses monitoring tidak diperkenankan mengganggu proses implementasi.
- b. Pemonitor tidak diperkenankan melakukan intervensi karena dapat menghilangkan peluang berkembangnya dikresi/inovasi.
- c. Pemonitor tidak diperkenankan menyampaikan hasil monitoring kepada yang dimonitor, tetapi kepada atasan yang dimonitor.
- d. Pemonitor tidak diperkenankan mengambil anggota dari pelaksana, atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaksana

Bagi pemonitor, kecakapan dasar dalam memonitoring yang dibutuhkan adalah:

- a. Memahami proyek/ kebijakan yang dimonitor.
- b. Memahami pelaksana dan konteks pelaksanaan.
- c. Memahami (dan menguasai) metode penelitian cepat atau *RMA (rapid method assessment)*, dengan dua metode dasaryang harus dikuasai, yaitu:

- 1) Cepat menangkap temuan.
- 2) Cepat melakukan cara untuk mengungkap temuan

Agenda lanjutan dalam monitoring adalah, bahwa dalam pengawasan, yang sering kali terlupa adalah 4 "factor X", yaitu lupa untuk :

- a. Memastikan kebijakan selesai dirumuskan dan sudah selesai disosialisasikan.
- b. Memastikan publik mengetahui dan mengerti kebijakan yang diimplementasikan.
- c. Memastikan pelaksanaanya cakap dan siap.
- d. Memastikan pemonitornya mengerti monitoring dan cara monitoring yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan melalui pendekatan kualitatif dan perspektif emik, dimana penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian datanya dalam bentuk narasi, cerita mendalam atau rinci dari para responden hasil wawancara atau observasi. mengenai perspektif emik adalah data yang dipaparkan dan dikumpulkan dalam bentuk deskripsi, uraian detail menurut bahasa dan cara pandang subjek penelitian¹. Deskripsi informasinya atau sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan interpretasi dari peneliti, jika terdapat evaluasi atau interpretasi itu pun harus berasal dari subjek penelitian². Jadi bukan seperti pendekatan kuantitatif yang lebih pada untuk mengukur variable, dengan perspektif emik dimana data dikemukakan dalam batasan-batasan yang dikehendaki peneliti, dalam arti bahwa konsep yang diteliti diukur melalui indikator-indikator yang ditetapkan lebih dulu oleh peneliti baik jumlah maupun jenisnya dengan menggunakan kuisioner dengan pilihan tertutup sesuai yang dikehendaki peneliti³.

B. LOKASI PENELITIAN

Kota Surabaya merupakan lokasi yang dipilih oleh peneliti, dengan alasan bahwa peneliti berdomisili di kota ini sehingga memudahkan peneliti untuk

¹ Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)*, UMM Press, Malang, Hlm. 55

² Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)*, UMM Press, Malang, Hlm. 55

³ Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)*, UMM Press, Malang, Hlm. 55

melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan penelitian ini, ⁵³ Yang spesifik dan menarik untuk diteliti di lokasi sentral wisata kuliner wilayah Gubeng ini adalah penertiban PKL sektor kuliner yang berjalan kondusif tanpa adanya suatu gejala yang berarti dan pasca penertiban lokasi berjualan tempat tersebut selalu ramai pengunjung disetiap harinya.

C. FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan terhadap proses penertiban PKL sektor kuliner, sebagaimana lazimnya yang umum terjadi masih terdapat ketidakpuasan pihak pedagang, serta tidak setujunya dan kekuatiran pedagang dalam menjalankan perputaran ekonomi, sehingga hal ini yang membuat peneliti ingin mengetahui dan mendalami bagaimana prosedur penertiban itu berjalan dari proses sampai pada pelaksanaan, selain itu apakah penertiban dan penataan yang dilakukan dapat sesuai dengan harapan, hal ini perlu diteliti dikarenakan Kota Surabaya mendapat apresiasi dari pemerintah daerah lain dan khususnya masyarakat Surabaya atas keberhasilannya membentuk sentra wisata kuliner.

D. ⁶² TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada umumnya adalah⁴:

1. ⁵⁶ **Wawancara** :Melalui wawancara peneliti memperoleh informasi berdasarkan penuturan informan atau responden yang disengaja diminta

⁴ Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)*, UMM Press, Malang, Hlm. 56

oleh peneliti. ¹¹ Teknik ini menuntut peneliti untuk bertanya sebanyak - banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci.

2. **Observasi** : Dengan ⁴² melakukan observasi peneliti dapat melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan para responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari baik sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya. Aktivitas yang diamati terutama yang berkaitan dengan konsep-kunci penelitian, tanpa melakukan intervensi atau memberi stimuli pada aktivitas subjek penelitian.

⁶³ 3. **Dokumentasi** : Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga, organisasi maupun dari perorangan, catatan penting bisa didapat dari buku referensi dan literature, selain itu juga dapat diperoleh melalui internet yang berhubungan dengan ⁵⁹ masalah yang dibahas dalam penelitian.

E. PROSES MEMASUKI WILAYAH PENELITIAN

Di dalam memasuki wilayah penelitian diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, peneliti akan mengajukan surat Ijin dari Pimpinan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk dapat melakukan penelitian terhadap tempat yang akan diteliti seperti, Pemerintahan Kota Surabaya, Perwakilan Pedagang dan Perwakilan asosiasi PKL dimana pihak - pihak tersebut diatas yang mempunyai kepentingan- kepentingan dalam penertiban dan penataan.

F. HUBUNGAN DENGAN SUBJEK DAN INSTRUMEN PENELITIAN³⁵

Dalam beberapa karya tulis metodologi penelitian para penulis menyebut informan atau responden sebagai subjek penelitian, hal ini disebabkan karena mereka yang menjadi pelaku pemberi informasi atau data dalam suatu penelitian. Peneliti bukan sebagai subjek penelitian, bahkan dalam penelitian kualitatif peneliti disebut instrument penelitian. Peneliti telah menetapkan subjek penelitian terhadap pemerintah kota Surabaya, sebagaimana dalam proses penertiban dan penataan pedagang tersebut mempunyai andil, dan kepentingan. Adapun di dalam pihak yang terlibat terdiri beberapa unsur yaitu, perwakilan pedagang, perwakilan asosiasi PKL, perwakilan pemerintah. Untuk menjalin hubungan dengan subjek peneliti menggunakan teknik snow ball sampling (bola salju), karena selain peneliti belum mengenal populasi dan lokasi yang luas dengan menggunakan teknik tersebut dapat memperoleh informasi atau data detail juga mendapat jumlah responden penelitian⁵. Perolehan data yang semakin lama semakin banyak, baik yang berasal dari setiap responden maupun setelah berpindah dari satu responden ke responden yang lain tersebut tidak ubahnya (analogi) seperti bola yang menggelinding dari puncak gunung yang bersalju, yang semakin lama bola tersebut akan semakin besar karena ada salju yang melekat padanya. Sebagai suatu konsep, Snow ball sampling merupakan pelabelan (pemberian nama) terhadap suatu aktivitas ketika peneliti mengumpulkan data dari satu responden berpindah ke responden yang lain yang memenuhi kriteria, melalui wawancara mendalam dan berhenti ketika tidak ada informasi baru lagi, terjadi replikasi atau pengulangan variasi informasi, mengalami titik jenuh

⁵ Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)*, UMM Press, Malang, hlm. 82

informasi, dalam arti ¹¹ informasi yang diberikan oleh informan berikutnya sama saja dengan yang diberikan oleh informan sebelumnya.

G. PROSES PENGUMPULAN DATA

Strategi pengumpulan data ⁶⁴ ini perlu mendapatkan perhatian peneliti karena melalui langkah perijinan peneliti mengawali terjun ke subjek, sekaligus melakukan upaya agar dikenal. Tujuan utama perijinan ini adalah menciptakan kondisi dan situasi hubungan sosial diantara peneliti dengan orang-orang disekitar penelitian⁶.

H. KEHANDALAN DATA

¹¹ Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya melalui teknik-teknik berikut⁷:

1. **Trianggulasi Metode:** Informasi dan data yang berasal dari wawancara di uji dengan hasil observasi.
- ¹¹ 2. **Trianggulasi Peneliti:** Informasi dan data yang diperoleh ⁷ diuji oleh anggota tim yang lain.
3. **Trianggulasi Sumber:** Informasi dan data yang diperoleh ⁷ ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi.
4. **Trianggulasi Situasi:** Bagaimana penuturan seorang responden jika dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri.

⁶ Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)*, UMM Press, Malang, hlm. 62

⁷ Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)*, UMM Press, Malang, hlm. 68

53

5. Trianggulasi Teori: Apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.

12

I. TEKNIK ANALISA DATA

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah menggunakan model interaktif

Miles dan Huberman⁸ :

21

Reduksi Data: Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif⁹. Faktanya, bahkan "sebelum" data secara aktual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih, sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat gugus, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo) dan reduksi data.pentransformasian proses terus menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap¹⁰.

22

⁸ Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA*, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 129

⁹Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA*, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 129

¹⁰Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA*, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 130

2 Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis¹¹. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi¹². Peneliti membuat sesuatu menjadi jelas: dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikan kuantifikasi¹³. Data kualitatif dapat direduksi dan di transformasikan dalam banyak cara, yaitu: melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau paraphrase, melalui menjadikannya bagian dalam suatu pola yang besar, dan seterusnya serta kadang-kadang mungkin lebih baik untuk mengubah data ke dalam angka-angka atau *ranking* (sebagai contoh peneliti memutuskan bahwa situs menjadi terlihat pada suatu lantain “tinggi” atau “menengah” dari sentralisasi administrasi), tetapi ini tidak selalu bijak¹⁴. Bahkan, ketika dia dianggap sebagai suatu strategi analisis yang baik, tujuan penelitian adalah simpanlah angka-angka tersebut, dan kata-kata yang digunakan untuk memperoleh angka-angka tersebut,

7
¹¹Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 130

¹²Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 130

¹³Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 130

¹⁴Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 130

⁴bersama-sama dalam analisa lanjutan, cara itu peneliti tidak pernah menggariskan data ditangan dari ²konteks di mana data tersebut muncul¹⁵.

1. Model Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Peneliti mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan, model (*displays*) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukuran bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Melihat sebuah tayangan membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut¹⁶.

Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks *naratif*. Teks (dalam bentuk, katakanlah 3.600 halaman dari catatan lapangan) adalah kesulitan yang mengerikan¹⁷. Teks tersebut berserakan, berurutan ketimbang serempak, tidak beraturan dan sangat luas. Dibawah keadaan demikian adalah mudah bagi peneliti kualitatif untuk melompat dengan terburu-buru, secara parsial, kesimpulan tidak ditemukan. Tendensi kognitif ⁴adalah mereduksi informasi yang kompleks kedalam berbagai *Gestalt* yang dipilih atau di konfigurasi-konfigurasi yang mudah dipahami. Sa,a halnya informasi yang terang.

¹⁵Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 130

¹⁶Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 131

¹⁷Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 131

⁴ Seperti sebuah episode yang menggambarkan “melompat keluar” dari halaman 124 dari catatan lapangan setelah bagian panjang yang “membosankan” dan secara drastis memperoleh sesuatu yang sangat berat, halaman-halaman 109-123 telah dihancurkan¹⁸. Teks naratif, dalam pengertian ini, memuat terlalu banyak kemampuan memproses informasi manusia dan berpengaruh pada kecenderungan menemukan penyederhanaan pola-pola¹⁹.

Dalam tujuan pekerjaan peneliti menjadi yakin bahwa model yang lebih baik adalah suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid²⁰. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang bermanfaat²¹.

Satu kali lagi, ambil catatan secara hati-hati ; sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dan analisis, ia merupakan bagian dari analisis²².

⁷
¹⁸Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 131

¹⁹Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 132

²⁰Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 131

²¹Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 131

²²Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 131

2 Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan ke dalam sel mana adalah aktivitas analisis²³.

2. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi²⁴. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme), tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar, menggunakan istilah klasik Kesimpulan "akhir" mungkin tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana- tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memroses secara induktif²⁵. Penarikan kesimpulan hanyalah

23Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 131

24Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 133

25Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 133

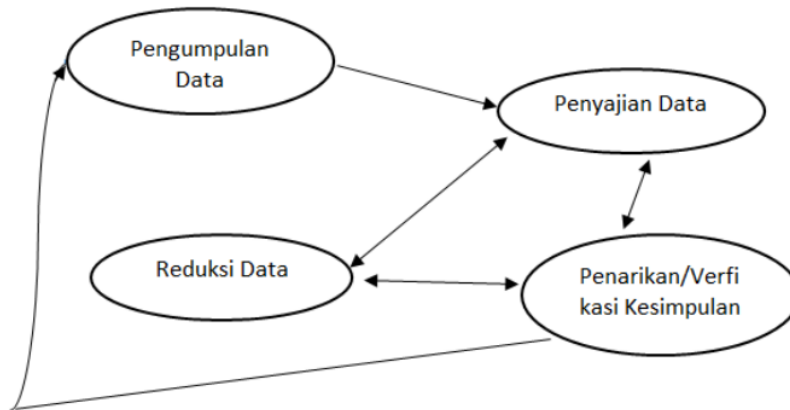
sebagian dari ² suatu konfigurasi Gemini²⁶. Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses. Verifikasi tersebut mungkin seringkas "pemikiran kedua" yang berlalu dengan cepat lewat pikiran peneliti selama menulis dengan suatu tamasya pendek kembali ke catatan lapangan atau verifikasi tersebut mungkin melalui dan dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan di antara kolega untuk mengembangkan "konsensus antar subjek", atau dengan usaha untuk membuat replikasi suatu temuan dalam rangkaian data yang lain 161. Secara singkat, makna muncul dari data yang telah di uji kepercayaannya. Kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya. Dengan cara lain peneliti berhenti dengan cerita-cerita menarik tentang kebenaran yang tidak diketahui dan bermanfaat²⁷. Peneliti telah menyajikan ketiga tahap ini yakni reduksi data, model data dan penarikan/verifikasi kesimpulan-sebagai antar jalinan sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk paralel, untuk menyusun domain umum yang disebut "analisis". Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

²⁶Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 133

²⁷Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 133

60
Gambar III. 1

Komponen Analisis Data : Model Interaktif Miles dan Huberman



32
 Dalam tinjauan ini ketiga jenis aktivitas analisis dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk suatu proses siklus interaktif. Peneliti secara mantap bergerak di antara ke empat model ini selama pengumpul data, model dan penarikan/verifikasi kesimpulan untuk sisa studi tersebut²⁸. Pengodean data, sebagai contoh (reduksi data), menuju pada ide-ide baru pada apa yang harus dimasukkan ke dalam suatu matrik (model data), memasukkan data memerlukan reduksi data lanjutan. Sebagaimana matrik mengisi halaman, kesimpulan-kesimpulan, pendahuluan digambarkan, tetapi kesimpulan-kesimpulan tersebut menuntun ke arah keputusan (sebagai contoh) untuk menambah kolom lain pada matrik untuk menguji kesimpulan²⁹.

28 Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, Hlm. 134

29 Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, Hlm. 134

4 Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang ulang secara terus menerus. Masalah reduksi data. Model, dan penarikan/verifikasi kesimpulan masuk ke dalam gambar secara berurutan sebagai episode-episode analisis mengikuti masing-masing yang lain. Tetapi dua masalah yang lain selalu menjadi bagian dari dasar³⁰.

Proses tersebut, secara aktual tidak lebih kompleks, secara konseptual, daripada model-model analisis yang digunakan oleh peneliti kuantitatif³¹. Model-model kuantitatif terlalu asyik dengan reduksi data (menghitung rerata, simpangan baku, indeks), dengan model (table-tabel korelasi, print out regresi), dan dengan penarikan/verifikasi kesimpulan (level signifikansi, perbedaan-perbedaan eksperimental/control), intinya adalah bahwa aktivitas aktivitas ini dilaksanakan dengan definisi yang baik, metode yang familiar, dan memiliki hukum-hukum yang mengaturnya dan biasanya lebih berurutan daripada berulang-ulang atau siklus³². Pada sisi yang lain, kita melihat bahwa peneliti kualitatif biasanya lebih lancar dan selalu lebih cepat memulai penelitiannya, dibandingkan selain mereka, akan tetapi, ada sebuah konsekuensi yang harus diambil dari kenyataan pada penelitian kualitatif ini, analisis kualitatif perlu lebih didokumentasikan lagi sebagai sebuah

7
³⁰Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, Hlm. 135

³¹Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, Hlm. 135

³²Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, Hlm. 135

proses dari pada yang sudah-sudah³³. Hal ini diperlukan untuk tujuan pengauditan dari beberapa sarana analisis komersial yang sudah ada, dan diperlukan juga sebagai sarana pembelajaran. Jadi, jika kita berada sebagai seorang peneliti kualitatif, pada saat kita menganalisis data, penting sekali bagi kita untuk lebih memahami permasalahan yang terjadi, sehingga dengan demikian kita dapat mengembangkan sebuah metode yang nantinya bisa digunakan berulang kali³⁴.

³³Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, Hlm. 135

³⁴Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, Hlm. 135

BAB IV

TEMUAN HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL WAWANCARA

Sebagai tahap awal menganalisis data hasil dari terjun ke Lapangan atau hasil dari Penelitian, maka peneliti mencoba untuk memberikan data awal berupa profil singkat informan sebagai pengantar Analisa kita tentang ¹³ **Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima** Bidang Kuliner di Kecamatan Gubeng.

Kedua informan ini adalah Bapak H. Supriono dan Bapak Imam Budi, beliau berbicara bagaimana awal mula PKL dibuatkan tempat yang Namanya menjadi Sentra Wisata Kuliner.

Bp. H. Supriono (Ketua PKL) : Kita berdiri tahun 2007 waktu itu pemerintah kota tidak mengundang sentra nya, kita ini berdiri beberapa tahun sebelum ada sentra, harapan kita kan bagaimana mengelola tempat tersebut menjadi ramai, semua tempat berkewajiban untuk meramaikan tempat tersebut bagaimana caranya, semisal lomba ikan hias, Latihan karate, ya alhamdulillah ada semacam sirkulasi pengunjung. Saya pernah cerita juga disini yang punya kemampuan main gitar begitu enak, kemudian tempat tempat yang lain kayak di kampus, contoh lain di sentra PKL Siwalankerto, Ketika Pandemi Lockdown langsung sepi tidak ada yang jualan tidak seperti Dharmahusada,

bahkan sesama pinggir jalan, bratang, dan lainnya, coba di Bratang tidak ada musiknya pasti sepi. Itu yg menurut saya paling rame, karena apa orientasi pengunjung ya pelanggan karna datang ya lungguh makan sewajarnya sambil dengar music, kalau tempat saya ya fokusnya ke makan diberi musik ya tambah sepi. Seperti bungkul makanya saya bilang jangan dikaitkan jumlah kepala dengan jumlah pendapatan.

Keberadaan sentra kuliner itu kan memang kebijakan pemerintah kota dalam rangka untuk melakukan penataan PKL terkait dengan keberadaan di pinggir jalan, di Surabaya ini sekitar ada 50 sentra yg dibangun, perkiraan seluruh Surabaya mulai dari barat, babat jerawat, lidah wetan, lidah kulon itu semua memanfaatkan lahan kosong milik pemkot, untuk sosialisasi kami diundang kebanyakan di balai rw atau kecamatan untuk relokasi, yg sering terjadi di awal adalah tentangan ketika punya usaha sendiri bisa tenda 3x4 meter tetapi ketika di sentra itu kan di lahan yg lebih kecil, Cuma masalahnya temen temen berfikiran awal selalu pesimis, apakah dari tempat asal pindah ke sentra itu laku atau tidak. Namun tidak begitu secara steril dari mereka yang nyaris tidak pernah dibangun tenda bawah yang selama ini di Surabaya karena memang nggak diterima. Nggak prospek sekali, Makanya dulu kita pernah waktu jadi konsultan itu pernah kita sampaikan bahwa mereka kontak dengan koperasi lewat semacam tanya kesempurnaan itu kita sampaikan ke pimpinan bahwa sebetulnya yang mau kita, yang mau kita kedepankan itu aturan dulu atau meramaikan dulu. Kalau kita ngomong aturan secara ketat dan aturan resikonya nggak bisa, lanjutnya. Karena banyak kasus sentra itu rame. Dulu pernah saya sama temen temen kantor,

kecamatan dan koperasi kita punya rencana adakan karaoke. Tujuan kita bukan meramaikan, tapi mengadakan pengunjung. Artinya, ketika kita hadirkan, pengunjung akan punya semacam tantangan untuk melayani sebaik mungkin agar dapat pengunjung yang datang pada saat event karaoke ini ditutup akhirnya. Jadi tidak hanya pengunjung, mereka jadi pelanggan. Itu makanya ada tahapan tahapan yang penting agar itu kalau kita mau meramaikan, catat juga karena ada lomba sampe bawa supporter rame rame. Tapi ketika bercakap cakap memberikan layanan terbaik, ya mereka menjadi pelanggan. Pelanggan hanya pengunjung waktu itu saja. Sangat susah, selain levelnya tinggi, yang itu tantangan sekali. Ini sebetulnya lebih kepada pemerintah apa yang mereka lakukan. Mereka tidak menganggap dijamin sekarang itu lebih mudah dekat dengan apa ya kalau boleh ngomong itu karena pemerintah itu berani berpikir secara otomatis. Jadi berpikir di luar kelaziman. Kalau tidak diperlukan sebelumnya, akan gak ada lahan kosong dimanfaatkan untuk sesuatu yang mereka tidak dapat penghasilan. Kalau berfikir bisa dijalankan seolah olah ada penghasilan, trus apa beberapa tempat yang sewakan akan baik? Jadi kalau kita mau hidup itu ya sama itu ya retribusi yang diberikan oleh pedagang di sentra kuliner. Pernah juga ada survei acak iklan muncul pada salah satu kecamatan dari ini sekarang mendirikan koperasi. Dan apa sih yang kita berikan pada kita? Kemudian kita jadikan andalan itu brandingnya akhirnya koperasi, sehingga untuk sementara makan di tempat lain. Masyarakat Kota Surabaya berharap dengan dibangunnya Sentra adalah lahan untuk mencari rejeki dan memudahkan mencari kuliner di lingkungan terdekat yang mereka tinggali.

Bp. Imam Budi (kasi penanganan PKL & Gakin): Sebenarnya kebijakan Pemkot dalam mengelola Sentra adalah tugas Bersama dari berbagai instansi, seperti kecamatan dan kelurahan pun ikut andil dalam hal tersebut dikarenakan kelurahan yang mendata mana saja warga yang layak mendapat stan di Sentra tersebut, lalu tugas Kecamatan adalah verifikasi apa yang sudah di approve oleh kelurahan, apalagi saat ini kebijakan terbaru adalah Sentra dikhususkan bagi warga yang masuk di daftar Padat Karya atau Gamis (Keluarga Miskin). Hal ini yang menyebabkan muncul persepsi dari beberapa segi, misalnya Dari sisi biaya? Kalau pada kenyataannya dari pemerintah kota dalam arti tidak hanya kata, tetapi bisa juga bisa juga dana bagi hasil bisa cepat dan dana dari jasa. Tetapi jika saya bilang pemerintah juga memberinya sangat nanggung, hanya diberi stan saja yang free Kerjasama dengan dinas koperasi, tetapi untuk pengisian bahan pokok nya mereka tetap memakai modal sendiri. Dan beberapa Sentra produk yang mereka jual mayoritas adalah sama, tidak ada yang signifikan berbeda yang punya produk sendiri dan bisa di branding untuk menjadi keunggulan dalam satu titik lokasi Sentra tersebut. Jika semua Sentra mempunyai brand yang diunggulkan pasti warga juga tidak akan bosan untuk dating mengunjungi Sentra. Yang menjadi permasalahan disini karena telah ketika mungkin barulah setiap tahun yang dengan standarisasi upah itu yang pasti berubah naik naik. Artinya kan terhadap standarisasi yang baru itu pun itu karena kita juga bisa bisa berubah gitu.

Artinya mungkin yang lalu dengan standarisasi 4 juta mungkin sekarang sudah di level hampir 5 juta. Ketika mungkin yang padat karya sudah masuk dalam level nasional mendekati 4 juta, yang seharusnya target itu sudah sudah masuk pada output yang akhirnya masih level 4 juta. Apakah nanti akan tetap di biyai

karena levelnya sudah lewat. Selain itu yang memiliki stan harus pintar pintar melihat segmentasi pasar mereka, apa yang membuat mereka laku, bagaimana caranya, dan usaha apa yang dilakukan, jika sudah ada segmen tersebut instansi terkait juga harus ikut andil misal dalam promosi brand agar sentra di titik tersebut bisa jadi contoh untuk sentra di titik lokasi yang lain.

B. PEMBAHASAN MASALAH

Dari beberapa Pertanyaan yang diajukan dalam tahapan untuk mengetahui bagaimana respon dari para responden diantaranya sebagai berikut :

1. Tentang: Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung implementasi Perda?

Adanya Pelatihan Anggota PKL, dimana Pemerintah menyelenggarakan Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan. Dan fokus pada peningkatan manajerial, sanitasi, dan aspek kebersihan.

Dalam bantuan keuangan pemerintah pemberian bantuan keuangan kepada pedagang untuk membantu mereka memperbaiki atau meningkatkan stand dagang. Serta tujuan adalah mendorong peningkatan kualitas dan daya saing pedagang.

Dalam segi infrastruktur dan fasilitas, investasi dalam perbaikan infrastuktur dan fasilitas di sekitar Sentral PKL, termasuk peningkatan aksesibilitas dan keamanan. Dan dalam pembangunan tempat parker dan area istirahat untuk mendukung aktivitas pedandang.

Pemantauan dan penegakan: Penyediaan tim pemantau untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan PERDA. Serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan untuk menciptakan lingkungan yang teratur.

Untuk sosialisasi PERDA: Dapat melakukan kampanye sosialisasi secara rutin ke pedagang dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan pemahaman terhadap PERDA. Dan menggunakan media cetak, online, dan acara komunitas untuk mencapai audiens yang lebih luas.

Sebagai konsultasi dengan stakeholder: melibatkan pedagang, masyarakat, dan kelompok terkait dalam proses konsultasi untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dan menciptakan forum dialog yang terbuka untuk mengakomodasi masukan dan umpan balik.

2. *Tentang: Terkait Dukungan Pemerintah dan DPRD. Sejauh mana Walikota dan DPRD Surabaya mendukung implementasi Perda ini?*

Adanya Komitmen Walikota Surabaya secara aktif mendukung implementasi PERDA dengan menyuarakan pentingnya pemberdayaan pedagang kaki lima dalam pertemuan public dan konferensi serta melakukan kunjungan langsung ke Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan untuk memastikan pemahaman langsung terhadap tantangan yang dihadapi.

Hadirnya Partisipasi DPRD Surabaya yaitu Anggota DPRD Surabaya terlibat dalam pembahasan dan perumusan kebijakan terkait PERDA dan mereka mengadakan rapat kerja dan konsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesepahaman dalam mendukung langkah – langkah

implementasi. Dalam alokasi anggaran, DPRD berperan dalam alokasi anggaran untuk mendukung program pemberdayaan PKL sesuai dengan PERDA. Dimana pemerintah daerah dan DPRD bersama – sama mengamati ketersediaan sumber daya untuk memastikan implementasi yang efektif.

Adanya pengawasan dan evaluasi DPRD Surabaya secara aktif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi PERDA, termasuk melibatkan komisi terkait. Mereka melakukan evaluasi berkala terhadap capaian dan kendala yang mungkin muncul selama proses implementasi.

Adanya respons terhadap tantangan yaitu Pemerintah dan DPRD merespon cepat terhadap tantangan yang dihadapi, seperti penyesuaian aturan atau perubahan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Dengan demikian, kerjasama yang erat antara Walikota Surabaya dan DPRD menjadi kunci dalam mendukung dan memastikan keberhasilan implementasi PERDA mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima.

3. *Tentang: Terkait Dukungan Pemerintah dan DPRD. Bagaimana peran DPRD dalam proses pembahasan dan penetapan Perda tersebut?*

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki peran krusial dalam proses pembahasan dan penetapan Perda (Peraturan Daerah). Berikut adalah beberapa tahapan dan peran DPRD dalam proses tersebut: Perihal Inisiasi Rancangan Perda, DPRD dapat menginisiasi pembahasan Perda sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dan Anggota

DPRD dapat mengusulkan rancangan Perda atau merespons tuntutan masyarakat terkait isu tertentu.

Pembahasan Rancangan Perda dimana DPRD membentuk panitia khusus atau komisi yang bertanggung jawab untuk membahas rancangan Perda. Anggota DPRD melakukan diskusi, konsultasi, dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, ahli, dan masyarakat.

Mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendengarkan pandangan masyarakat dan pihak terkait terhadap rancangan Perda dan Proses ini membuka ruang partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Adanya Perubahan dan Penyesuaian, DPRD memiliki wewenang untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap rancangan Perda sesuai dengan hasil pembahasan dan masukan yang diterima. Dan Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang dapat diakomodasi oleh semua pihak terkait.

Dalam Pengambilan Keputusan, mereka melakukan pemungutan suara atau pengambilan keputusan terkait persetujuan terhadap rancangan Perda. Dan Mayoritas suara dari anggota DPRD diperlukan untuk menetapkan Perda. Dalam Penetapan Perda tersebut. Setelah melewati seluruh tahapan pembahasan, DPRD menetapkan Perda sebagai undang-undang tingkat daerah. Dan Penetapan ini menandai kesepakatan resmi untuk mengimplementasikan aturan yang tertuang dalam Perda. Dengan demikian, DPRD memiliki peran penting dalam membentuk, membahas, dan menetapkan Perda, sehingga menggambarkan kebijakan hukum daerah yang berlaku.

4. *Tentang: Partisipasi Pedagang Kaki Lima. Sejauh mana pedagang kaki lima terlibat dalam proses implementasi dan bagaimana persepsi mereka terhadap kebijakan pemberdayaan?*

Partisipasi dalam Perumusan Kebijakan. Sejauh mana pedagang kaki lima terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemberdayaan sangat bergantung pada tingkat inklusivitas pemerintah daerah. Dan PKL yang aktif berpartisipasi dapat memberikan masukan langsung melalui forum konsultasi dan rapat terbuka.

Proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Konsultasi sering memberikan platform bagi pedagang untuk menyuarakan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Persepsi mereka terhadap kebijakan dapat tercermin dari masukan yang disampaikan selama proses ini.

Mengadakan Sosialisasi Kebijakan dimana Pedagang yang terlibat dalam kebijakan mungkin mendapatkan informasi melalui kampanye sosialisasi pemerintah. Persepsi mereka terhadap kebijakan bisa dipengaruhi oleh pemahaman yang diberikan dalam tahap ini.

Keberlanjutan Pelatihan dan Dukungan, Jika pemerintah menyediakan pelatihan dan dukungan, pedagang yang aktif berpartisipasi dapat mengambil manfaat lebih besar dari program tersebut. Persepsi positif dapat muncul jika pelatihan dianggap relevan dan bermanfaat.

Respons terhadap Dukungan Finansial dari pemerintah mungkin memiliki persepsi positif terhadap upaya pemberdayaan. Keterlibatan langsung mereka dalam program ini dapat menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan.

Evaluasi dan Umpan Balik, Proses evaluasi yang melibatkan pedagang untuk memberikan umpan balik tentang dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Persepsi mereka dapat tercermin dalam evaluasi ini, baik itu kesuksesan atau tantangan yang dihadapi.

Dengan memahami partisipasi pedagang kaki lima dalam setiap tahap implementasi dan mendengarkan persepsi mereka, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan kebijakan pemberdayaan mencapai hasil yang diharapkan.

5. *Tentang: Partisipasi Pedagang Kaki Lima. Apakah ada mekanisme partisipasi atau konsultasi pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan terkait implementasi Perda?*

Mekanisme partisipasi atau konsultasi pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan terkait implementasi Perda dapat mencakup langkah-langkah Forum Konsultasi Rutin, dimana Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan forum konsultasi reguler dengan perwakilan pedagang kaki lima untuk mendiskusikan isu-isu terkait kebijakan dan implementasi Perda serta Forum ini memberikan ruang bagi pedagang untuk menyampaikan masukan dan memahami lebih lanjut proses kebijakan.

Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara berkala untuk memungkinkan pedagang kaki lima memberikan masukan langsung terkait pengalaman mereka, hambatan yang dihadapi, dan saran perbaikan serta Proses ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan.

Adanya Penyuluhan dan Sosialisasi yang Melibatkan PKL dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait Perda, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan tujuan pemberdayaan dan Pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendengarkan masukan dan tanggapan langsung.

Pembentukan Kelompok Kerja Bersama bersama yang terdiri dari perwakilan pedagang kaki lima, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Dimana Kelompok ini dapat berkumpul secara berkala untuk membahas implementasi, mengevaluasi program, dan mencari solusi atas masalah yang muncul.

Membangun platform digital atau aplikasi khusus untuk mendukung komunikasi antara pemerintah dan PKL serta Forum online dapat digunakan untuk menyampaikan ide, masukan, dan mendapatkan tanggapan secara real-time.

Melakukan survei periodik atau fokus group diskusi untuk memahami pandangan lebih dalam dari sejumlah pedagang kaki lima. Dimana Data dari survei ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mekanisme ini diharapkan dapat menciptakan proses partisipatif yang lebih efektif, memperkuat hubungan antara pemerintah dan pedagang kaki lima, serta meningkatkan peluang keberhasilan implementasi Perda pemberdayaan pedagang kaki lima.

6. Tentang: Perubahan dalam Kondisi Usaha. Apakah implementasi Perda memiliki dampak langsung pada kondisi usaha pedagang kaki lima, seperti peningkatan pendapatan atau akses ke fasilitas pendukung?

Implementasi Perda dapat memiliki dampak langsung pada kondisi usaha pedagang kaki lima. Berikut beberapa potensi dampak positif yang dapat terjadi Peningkatan Pendapatan dimana Program pemberdayaan yang diatur oleh Perda dapat memberikan peluang bagi pedagang kaki lima untuk meningkatkan keterampilan mereka, menjangkau pelanggan lebih luas, atau mendapatkan dukungan finansial dan Langkah-langkah ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan pedagang.

Adanya Akses ke Fasilitas Pendukung, Jika Perda mencakup pembangunan atau perbaikan infrastruktur di sekitar area pedagang kaki lima, seperti peningkatan aksesibilitas, pembangunan tempat parkir, atau area istirahat, maka pedagang dapat mengalami peningkatan kenyamanan dan fasilitas pendukung yang mendukung usaha mereka.

Jika program pemberdayaan mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan, pedagang kaki lima dapat memperoleh pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Dan peningkatan keterampilan ini dapat berdampak positif pada daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

Dengan adanya regulasi yang jelas melalui Perda, pedagang kaki lima dapat merasa lebih aman secara hukum serta Keamanan hukum ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil, memberikan keyakinan kepada

pedagang untuk mengembangkan usaha mereka tanpa takut akan tindakan hukum yang merugikan.

Namun, perlu diingat bahwa dampak ini dapat bervariasi tergantung pada efektivitas implementasi Perda, tingkat partisipasi pedagang, dan dukungan pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan. Evaluasi berkala diperlukan untuk memahami sejauh mana implementasi Perda memberikan dampak positif pada kondisi usaha pedagang kaki lima.

7. *Tentang: Perubahan dalam Kondisi Usaha. Bagaimana respon pedagang kaki lima terhadap perubahan-perubahan tersebut?*

Respon pedagang kaki lima terhadap perubahan yang mungkin terjadi akibat implementasi Perda dapat bervariasi. Berikut beberapa kemungkinan respon yang dapat terjadi jika perubahan menciptakan peluang baru, seperti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau akses ke fasilitas pendukung, pedagang kaki lima dapat merespons dengan positif dan peningkatan pendapatan atau kondisi usaha yang lebih baik dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi.

Pedagang kaki lima mungkin menghadapi tantangan atau ketidakpastian awal terkait perubahan kebijakan atau aturan baru serta respon awal mungkin mencakup kehati-hatian dan upaya untuk memahami dampaknya terhadap usaha mereka.

Jika program pemberdayaan ditawarkan, sebagian pedagang mungkin aktif berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pelatihan atau dukungan

finansial. Respon positif ini dapat tercermin dalam peningkatan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan.

Jika perubahan dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang, mereka mungkin menunjukkan ketidakpuasan atau bahkan resistensi terhadap implementasi Perda. Dan hal ini dapat terjadi jika regulasi dianggap memberatkan atau tidak memperhatikan kondisi nyata pedagang.

Beberapa pedagang yang adaptif dapat merespon perubahan dengan berinovasi dalam strategi pemasaran, produk, atau cara operasional mereka. Dan inovasi ini mungkin muncul sebagai upaya untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang berubah.

Penting untuk terus menggali pandangan dan pengalaman pedagang kaki lima melalui survei, fokus group diskusi, atau dialog terbuka. Dengan memahami respon mereka, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dan program pemberdayaan untuk mencapai dampak positif yang lebih besar.

8. *Tentang: Terkait Perizinan dan Regulasi. Bagaimana proses perizinan usaha bagi pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan?*

Proses perizinan usaha bagi pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan akan bergantung pada regulasi yang diatur oleh Perda Surabaya No. 17 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah tahapan umum proses perizinan tersebut PKL perlu mendaftarkan usaha mereka di pemerintahan daerah setempat, kemungkinan melalui kantor Dinas Perdagangan atau instansi terkait. Dan pendaftaran ini dapat melibatkan

pengumpulan dokumen seperti identitas pedagang, informasi tentang jenis usaha, dan lokasi yang diinginkan.

Pihak terkait, mungkin termasuk petugas dari Dinas Perdagangan atau instansi terkait, akan melakukan verifikasi dan penilaian lokasi usaha yang diajukan. Dan penilaian ini dapat mencakup pertimbangan terkait ketertiban umum, aksesibilitas, dan keamanan.

Setelah pendaftaran dan verifikasi, pedagang kaki lima kemungkinan diharuskan mengajukan dokumen perizinan tertentu, seperti izin usaha atau surat izin berdagang sesuai dokumen ini akan dinilai untuk memastikan sesuai dengan persyaratan Perda yang berlaku.

Pedagang kaki lima mungkin harus membayar retribusi atau biaya perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut dan pembayaran ini biasanya berfungsi sebagai kontribusi terhadap pemeliharaan fasilitas dan layanan pendukung. Dan Jika semua persyaratan terpenuhi, izin usaha atau perizinan resmi akan diterbitkan oleh pemerintah daerah dan izin ini dapat mencakup ketentuan terkait waktu dan lokasi operasional pedagang kaki lima.

Pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan rutin untuk memastikan kepatuhan pedagang kaki lima terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Evaluasi periodik juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kondisi usaha pedagang. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah dan perubahan dalam regulasi setempat. Pemerintah biasanya berupaya untuk memastikan

bahwa proses perizinan dapat dilakukan dengan efisien dan adil, sejalan dengan tujuan pemberdayaan pedagang kaki lima.

9. Tentang: Perizinan dan Regulasi. Apakah ada perubahan dalam regulasi yang memengaruhi keberlanjutan usaha pedagang kaki lima?

Informasi spesifik mengenai perubahan dalam regulasi terkait keberlanjutan usaha pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan tidak tersedia dalam konteks pengetahuan saya hingga batas waktu pemotongan informasi pada Januari 2022.

Perubahan regulasi yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha pedagang kaki lima dapat melibatkan berbagai aspek, seperti aturan lokasi, jam operasional, persyaratan keamanan, atau biaya perizinan. Jika terdapat perubahan dalam regulasi setempat, pedagang kaki lima mungkin harus menyesuaikan operasional mereka sesuai dengan ketentuan baru. Sarana terbaik untuk memperoleh informasi terkini tentang perubahan regulasi adalah dengan menghubungi instansi pemerintah setempat yang berwenang, seperti Dinas Perdagangan atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Mereka biasanya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan yang ada dan perubahan terbaru yang mungkin memengaruhi pedagang kaki lima di wilayah tertentu.

10. **Tentang: Dalam hal Pendidikan dan Pelatihan. Apakah program pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pedagang kaki lima?**

Evaluasi efektivitas program pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pedagang kaki lima dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti desain program, partisipasi pedagang, dan dukungan pemerintah. Program yang sukses sering kali menawarkan materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari pedagang kaki lima. Dan Pelatihan yang fokus pada peningkatan keterampilan manajerial, pemasaran, atau manajemen keuangan dapat membawa manfaat nyata.

Tingkat partisipasi pedagang dalam program pendidikan dan pelatihan memainkan peran kunci dalam keberhasilan. Dan program yang menarik dan mengakomodasi kebutuhan praktis pedagang dapat mendorong partisipasi aktif. Program yang menyediakan dukungan setelah pelatihan, seperti mentoring atau konsultasi lanjutan, dapat membantu menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam konteks nyata. Proses evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu pemerintah memahami sejauh mana program mencapai tujuannya. Umpan balik langsung dari pedagang kaki lima dapat memberikan wawasan berharga untuk peningkatan program di masa mendatang.

Program yang didukung dengan sumber daya memadai, seperti fasilitator berkualitas dan materi pelatihan yang baik, memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah, dapat memperkaya program dengan keahlian

tambahan. Pengukuran dampak jangka panjang, seperti peningkatan pendapatan atau perubahan positif dalam kondisi usaha, dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang keberhasilan program.

Sementara beberapa program dapat terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pedagang kaki lima, evaluasi yang cermat dan pemantauan terus-menerus penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata mereka.

11. Tentang: Dalam hal Pendidikan dan Pelatihan. Sejauh mana pedagang kaki lima mengakses dan mengambil manfaat dari program tersebut?

Sejauh mana pedagang kaki lima mengakses dan mengambil manfaat dari program pendidikan dan pelatihan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain Ketersediaan Informasi dimana PKL dapat mengakses program lebih baik jika mereka memiliki informasi yang jelas tentang ketersediaan dan manfaatnya serta komunikasi efektif dan promosi program dapat memastikan pedagang mengetahui peluang pendidikan dan pelatihan yang tersedia.

Program yang dirancang dengan fleksibilitas, seperti jadwal pelatihan yang dapat diakses, dapat meningkatkan partisipasi pedagang. Program yang dapat disesuaikan dengan jadwal kerja pedagang kaki lima yang mungkin tidak stabil bisa lebih efektif.

Pedagang cenderung lebih tertarik dan berpartisipasi aktif jika materi pelatihan relevan dengan kebutuhan dan tantangan usaha mereka. Program yang menyediakan solusi praktis dan langsung dapat menarik minat lebih

banyak pedagang. Dukungan dari pihak penyelenggara program, baik sebelum, selama, maupun setelah pelatihan, dapat memotivasi pedagang untuk mengambil manfaat maksimal. Pemahaman tentang keuntungan jangka panjang dari program juga dapat meningkatkan partisipasi.

Upaya untuk membuat program inklusif, dengan memperhatikan berbagai tingkat pendidikan dan kemampuan, dapat meningkatkan aksesibilitas bagi pedagang dengan latar belakang yang beragam. Perlunya dukungan finansial dan program memerlukan biaya, tingkat partisipasi dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan finansial, seperti beasiswa atau bantuan biaya.

Upaya penyuluhan dan kampanye sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima terhadap keberadaan program pendidikan dan pelatihan serta keterlibatan komunitas dalam proses sosialisasi juga dapat memotivasi partisipasi. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan respons langsung dari peserta dapat ⁸³ memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dan manfaat yang diambil oleh pedagang kaki lima.

12. Tentang: Perihal Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima. Bagaimana implementasi Perda berkontribusi pada kesejahteraan pedagang kaki lima, baik dari segi ekonomi maupun sosial?

Implementasi Perda (Peraturan Daerah) yang berfokus pada pemberdayaan pedagang kaki lima dapat memberikan kontribusi positif pada

kesejahteraan mereka, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Berikut adalah beberapa cara implementasi Perda dapat berkontribusi:

Aspek Ekonomi:

1. Peningkatan Pendapatan, program pemberdayaan yang melibatkan pelatihan keterampilan dan dukungan finansial dapat membantu pedagang meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka, serta peningkatan kualitas dan daya saing ini dapat berdampak positif pada pendapatan pedagang.
2. Akses ke Modal dan Kredit, Perda yang mendukung akses pedagang kaki lima ke modal dan kredit dapat membantu mereka untuk mengembangkan atau memperluas usaha mereka. Dan fasilitas keuangan yang lebih mudah diakses dapat meningkatkan kemampuan pedagang dalam mengelola modal.
3. Peluang Pengembangan Usaha, Regulasi yang menciptakan peluang pengembangan usaha, seperti memberikan akses ke tempat yang strategis atau mendukung inovasi produk, dapat membantu pedagang mengeksplorasi peluang pasar baru.

Aspek Sosial:

1. Pemberdayaan Melalui Pendidikan, dimana program pendidikan yang diakomodasi dalam Perda dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagang, memberikan landasan yang lebih kuat untuk pengelolaan usaha serta pendidikan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian pedagang.

2. Perlindungan Hukum dan Keamanan yaitu regulasi yang menyediakan perlindungan hukum dan keamanan bagi pedagang dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil serta rasa aman hukum dapat mendorong pedagang untuk beroperasi tanpa ketakutan akan pengusiran atau tindakan hukum yang merugikan.
3. Partisipasi dalam pengambilan keputusan melibatkan pedagang dalam proses pengambilan keputusan terkait regulasi dapat meningkatkan perasaan memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang memengaruhi mereka secara langsung. Partisipasi ini dapat menciptakan lingkungan dialog dan kerjasama antara pemerintah dan pedagang.
4. Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Lokal, dengan mendukung usaha pedagang kaki lima, terutama di sentral PKL, Perda dapat berdampak positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan komunitas setempat. Penyediaan fasilitas pendukung, seperti tempat parkir atau area istirahat, juga dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan lingkungan sekitar.

Implementasi Perda yang menyeluruh, berbasis partisipasi, dan mendukung keberlanjutan usaha pedagang kaki lima dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi komunitas tersebut.

13. Tentang: Perihal Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima. Apakah ada indikator kesejahteraan khusus yang dapat diukur sebagai hasil dari kebijakan pemberdayaan?

Terdapat sejumlah indikator kesejahteraan khusus yang dapat diukur sebagai hasil dari kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima. Berikut beberapa indikator yang relevan:

1. Pendapatan dan Laba Usaha:Peningkatan pendapatan atau laba usaha pedagang kaki lima dapat menjadi indikator langsung dari keberhasilan program pemberdayaan.Pengukuran perubahan pendapatan dapat memberikan gambaran tentang dampak positif kebijakan terhadap aspek ekonomi kesejahteraan.
2. Akses ke Fasilitas dan Infrastruktur:Peningkatan akses pedagang kaki lima ke fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti tempat parkir, sanitasi, atau area istirahat, dapat diukur.Ketersediaan fasilitas ini dapat mempengaruhi kesejahteraan lingkungan kerja pedagang.
3. Partisipasi dalam Program Pendidikan dan Pelatihan:Jumlah dan tingkat partisipasi pedagang kaki lima dalam program pendidikan dan pelatihan dapat dijadikan indikator keberhasilan kebijakan pemberdayaan.Peningkatan keterampilan dan pengetahuan dapat berdampak positif pada daya saing dan kesejahteraan pedagang.
4. Perasaan Keamanan dan Perlindungan Hukum:Survei atau penelitian tentang perasaan keamanan dan kepercayaan pedagang

kaki lima terhadap perlindungan hukum dapat memberikan gambaran tentang dampak regulasi pada aspek sosial kesejahteraan.

5. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Indikator partisipasi pedagang dalam proses pengambilan keputusan terkait regulasi dan kebijakan pemberdayaan. Tingkat keterlibatan dapat mencerminkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang memengaruhi mereka.
6. Tingkat Pendidikan dan Keterampilan: Perubahan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan pedagang kaki lima dapat dijadikan indikator kesejahteraan jangka panjang. Peningkatan dalam hal ini dapat memengaruhi daya saing dan kemampuan beradaptasi pedagang.
7. Peningkatan Lingkungan Sosial dan Komunitas: Indikator kesejahteraan sosial dapat mencakup perubahan dalam lingkungan sosial dan dukungan komunitas yang diterima oleh pedagang. Peningkatan interaksi positif dengan sesama pedagang dan masyarakat setempat dapat memperkuat kesejahteraan sosial.

Evaluasi yang cermat dan pengumpulan data secara sistematis terkait dengan indikator-indikator ini akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan memahami sejauh mana kebijakan pemberdayaan berhasil meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dan komunitas setempat.

14. Tentang: Perbedaan antar Lokasi. Apakah ada perbedaan signifikan dalam implementasi Perda dan dampaknya antara Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan?

Tanpa informasi yang lebih spesifik, sulit untuk memberikan perbandingan langsung antara implementasi Perda dan dampaknya di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan. Perbedaan signifikan dapat terjadi berdasarkan berbagai faktor, seperti kebijakan lokal, karakteristik ekonomi, dan tingkat partisipasi komunitas.

Namun, beberapa elemen yang mungkin menyebabkan perbedaan antara dua lokasi tersebut meliputi:

1. Perbedaan dalam konteks lokal, termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, dapat memengaruhi implementasi dan dampak Perda. Misalnya, karakteristik pasar atau kebutuhan pedagang kaki lima di Gubeng mungkin berbeda dengan Gayungan.
2. Tingkat dukungan dan komitmen dari pemerintah lokal di setiap lokasi dapat berbeda. Implementasi yang efektif memerlukan keterlibatan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
3. Tingkat partisipasi pedagang kaki lima dan komunitas setempat dapat bervariasi. Tingkat dukungan dan partisipasi aktif dapat memengaruhi sejauh mana program pemberdayaan berhasil diimplementasikan.
4. Perbedaan geografis dan infrastruktur antara Gubeng dan Gayungan dapat memengaruhi cara regulasi diimplementasikan dan dampaknya terhadap kegiatan pedagang kaki lima.

5. Kondisi ekonomi yang berbeda di dua lokasi tersebut dapat menciptakan perbedaan dalam tingkat pertumbuhan usaha pedagang dan kesejahteraan ekonomi.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, disarankan untuk merujuk pada penelitian atau laporan resmi yang mungkin telah dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait di Surabaya. Data dan informasi dari sumber-sumber resmi ini akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang perbedaan implementasi Perda dan dampaknya di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan.

15. Tentang: Perbedaan antar Lokasi. Faktor apa yang mungkin mempengaruhi perbedaan ini?

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perbedaan dalam implementasi Perda dan dampaknya antara Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan melibatkan berbagai aspek, termasuk konteks lokal, karakteristik ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berkontribusi:

1. Perbedaan dalam karakteristik ekonomi dan sosial antara Gubeng dan Gayungan dapat memengaruhi kebutuhan dan tantangan pedagang kaki lima. Pasar lokal, permintaan konsumen, dan kondisi lingkungan dapat bervariasi, memerlukan pendekatan yang sesuai dalam implementasi kebijakan.
2. Tingkat dukungan dan komitmen dari pemerintah lokal di masing-masing lokasi dapat memainkan peran kunci dalam keberhasilan kebijakan

pemberdayaan. Ketersediaan sumber daya, alokasi anggaran, dan tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah dapat berbeda.

3. Tingkat partisipasi dan organisasi komunitas pedagang kaki lima dapat bervariasi. Tingkat keterlibatan komunitas dalam proses implementasi dan pemantauan dapat memengaruhi efektivitas kebijakan.
4. Perbedaan dalam perkembangan ekonomi dan infrastruktur di dua lokasi dapat mempengaruhi akses pedagang kaki lima terhadap sumber daya dan peluang. Infrastruktur yang baik dapat membantu atau menghambat aktivitas perdagangan.
5. Faktor-faktor geografis, seperti lokasi, aksesibilitas, dan kepadatan penduduk, dapat memainkan peran dalam implementasi kebijakan. Karakteristik geografis dapat mempengaruhi pola bisnis dan kebutuhan pedagang.
6. Aspek-aspek sosial dan budaya lokal dapat mempengaruhi pola konsumsi, preferensi pelanggan, dan keberlanjutan model usaha pedagang kaki lima. Program pemberdayaan yang memahami dan menghargai konteks budaya setempat mungkin lebih berhasil.
7. Faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi pasar global, atau dampak krisis ekonomi, juga dapat mempengaruhi implementasi Perda dan kesejahteraan pedagang.

101

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini akan membantu

88

merancang dan menyesuaikan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan khusus di setiap lokasi.

16. Mengenai Tantangan dan Hambatan. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Perda ini, baik dari perspektif pemerintah, pedagang kaki lima, atau pemangku kepentingan lainnya?

Tantangan dalam implementasi Perda terkait pemberdayaan pedagang kaki lima bisa bervariasi dan melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi dari berbagai perspektif:

Dari Perspektif Pemerintah:

1. Pemerintah mungkin menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk mengimplementasikan program pemberdayaan dengan skala yang memadai.
2. Koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi Perda mungkin menjadi tantangan. Diperlukan kolaborasi yang efektif untuk memastikan kesinambungan dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Menegakkan regulasi dan hukuman terhadap pelanggaran aturan dapat menjadi sulit, terutama jika sumber daya penegakan hukum terbatas.
4. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin perlu menyesuaikan kebijakan atau regulasi yang ada agar lebih sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan pedagang.

Dari Perspektif Pedagang Kaki Lima:

1. Pedagang kaki lima mungkin menghadapi ketidakpastian terkait interpretasi dan penegakan aturan, yang dapat mempengaruhi kestabilan usaha mereka.
2. Meningkatkan kualitas usaha atau mematuhi regulasi baru dapat menimbulkan beban finansial, dan beberapa pedagang mungkin mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut.
3. Pedagang dengan akses terbatas terhadap sumber daya, seperti modal, pendidikan, atau pelatihan, mungkin kesulitan memanfaatkan program pemberdayaan.
4. Pemilihan lokasi atau distribusi fasilitas pendukung mungkin tidak merata, menciptakan ketidaksetaraan di antara pedagang kaki lima.

Dari Perspektif Pemangku Kepentingan Lainnya:

1. Tantangan mungkin muncul jika program pemberdayaan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi komunitas setempat.
2. Perbedaan sosial dan budaya di antara pedagang kaki lima dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan tantangan dalam komunikasi dan pemahaman.
3. Beberapa pemangku kepentingan mungkin merespons perubahan dengan resistensi, terutama jika perubahan tersebut dianggap mengganggu status quo.

4. Implikasi terhadap lingkungan dan tata ruang kota juga dapat menjadi isu yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan peraturan baru.

Mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, pedagang kaki lima, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

17. Tentang: Mengenai Tantangan dan Hambatan. Bagaimana pemerintah berupaya mengatasi atau merespons tantangan tersebut?

Pemerintah biasanya mengadopsi berbagai strategi dan langkah-langkah untuk mengatasi atau merespons tantangan dalam implementasi Perda terkait pemberdayaan pedagang kaki lima. Beberapa pendekatan umum yang mungkin diambil melibatkan:

1. Meningkatkan komunikasi dengan pedagang kaki lima dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan manfaat dari kebijakan yang diimplementasikan.
2. Mengundang partisipasi aktif dari pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat terkait dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan untuk memastikan representasi yang lebih baik.
3. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada pedagang kaki lima sehingga mereka dapat mematuhi peraturan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas usaha mereka.

4. Memberikan dukungan finansial atau akses ke sumber daya lainnya, seperti modal usaha, kepada pedagang kaki lima untuk membantu mereka memenuhi persyaratan dan meningkatkan daya saing.
5. Menyusun kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan pedagang, termasuk melakukan revisi atau penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
6. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur dampak kebijakan, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan memberikan dasar untuk peningkatan berkelanjutan.
7. Meningkatkan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dalam implementasi dan penegakan regulasi.
8. Memberikan dukungan psikososial kepada pedagang kaki lima yang mungkin mengalami tekanan atau kekhawatiran terkait perubahan kebijakan untuk meminimalkan dampak negatifnya.
9. Menjaga penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan dari pedagang kaki lima.
10. Menggunakan data dan bukti untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, sehingga langkah-langkah dapat diambil berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak nyata.

Pemerintah yang proaktif dalam menghadapi tantangan ini dan terlibat dalam dialog terbuka dengan semua pemangku kepentingan cenderung dapat

mencapai hasil yang lebih baik ³⁰ dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima.

18. Tentang: Terkait dengan Evaluasi dan Perbaikan. Bagaimana proses evaluasi implementasi Perda dilakukan, dan apakah ada mekanisme perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi?

Proses evaluasi implementasi Perda biasanya melibatkan beberapa langkah sistematis untuk mengukur dampak kebijakan, menilai keberhasilan implementasi, dan mengidentifikasi area perbaikan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses evaluasi dan mekanisme perbaikan:

1. Menetapkan tujuan jelas untuk evaluasi, termasuk parameter keberhasilan yang diinginkan dari implementasi Perda. Tujuan dapat mencakup peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima, peningkatan kepatuhan, atau dampak positif lainnya.
2. Mengumpulkan data yang relevan, baik melalui survei, wawancara, atau analisis statistik, untuk mengukur indikator-indikator kinerja dan dampak kebijakan. Data dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, dan dampak lingkungan.
3. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Perda telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Identifikasi tren, pola, dan variabel yang dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan.

4. Menilai dampak kebijakan terhadap pedagang kaki lima, komunitas setempat, dan faktor-faktor lain yang relevan. Mengevaluasi perubahan dalam kondisi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan pedagang.
5. Melibatkan pedagang kaki lima dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses evaluasi untuk mendapatkan pandangan langsung dari mereka. Meningkatkan validitas hasil dan memastikan representasi yang lebih baik.
6. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Perda dan menyoroti aspek-aspek yang berhasil dicapai. Menilai keberlanjutan program dan potensi perluasan kebijakan.
7. Berdasarkan hasil evaluasi, merancang mekanisme perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Menerapkan perbaikan kebijakan yang sesuai dengan temuan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif.
8. Menetapkan siklus evaluasi berkala untuk memastikan pemantauan yang berkelanjutan terhadap implementasi Perda. Evaluasi rutin membantu pemerintah untuk merespons perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi.
9. Mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada semua pihak terkait, termasuk pedagang kaki lima, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Membangun transparansi dan meningkatkan partisipasi dalam proses evaluasi dan perbaikan.
10. Melibatkan pihak terkait dalam konsultasi dan dialog terkait hasil evaluasi serta perubahan yang akan dilakukan. Mendengarkan masukan

dan pandangan dapat memperkaya pemahaman tentang dampak kebijakan.

Proses evaluasi yang baik diikuti dengan perbaikan yang tepat dapat membantu pemerintah meningkatkan keberhasilan implementasi Perda dan menjaga relevansi kebijakan terhadap kebutuhan pedagang kaki lima dan masyarakat setempat.

19. Tentang: Terkait dengan Evaluasi dan Perbaikan. Sejauh mana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima?

Sejauh mana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima bergantung pada seberapa terbuka dan responsif pemerintah terhadap temuan evaluasi. Berikut adalah beberapa cara umum di mana hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan:

1. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan atau aspek kebijakan spesifik yang mungkin perlu diperbaiki atau disesuaikan. Langkah-langkah perbaikan ini dapat mencakup revisi regulasi, perubahan strategi pelaksanaan, atau penyesuaian program pemberdayaan.
2. Temuan evaluasi dapat membimbing penyesuaian program pemberdayaan, seperti peningkatan konten pelatihan, penargetan yang lebih ...

20. Tentang: Terkait dengan Evaluasi dan Perbaikan. Sejauh mana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima?

Pemanfaatan hasil evaluasi untuk meningkatkan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat bervariasi tergantung pada respons pemerintah dan keterlibatan pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa kemungkinan sejauh mana hasil evaluasi digunakan:

Berikut beberapa kemungkinan sejauhmana hasil evaluasi yang menunjukkan kebutuhan perubahan dalam regulasi atau kebijakan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian yang relevan. Perubahan ini dapat melibatkan revisi peraturan untuk meningkatkan kejelasan, kesesuaian, atau fleksibilitas. Jika evaluasi mengungkap kelemahan dalam program pemberdayaan, pemerintah dapat merespon dengan meningkatkan konten, metode pelaksanaan, atau cakupan program. Penyesuaian ini dapat didasarkan pada temuan evaluasi yang menunjukkan area-area yang perlu ditingkatkan.

PENUTUP**A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, dapat disimpulkan beberapa poin kunci:

1. **Efektivitas Implementasi:** Implementasi Perda secara umum berhasil memberdayakan sebagian pedagang kaki lima, terlihat dari peningkatan akses ke perizinan usaha, fasilitas pendukung, dan pelatihan.
2. **Tantangan dan Kendala:** Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap hak-hak mereka, serta kendala administratif dalam mendapatkan perizinan.
3. **Dampak Positif:** Ditemukan dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan dan peningkatan keterampilan pedagang kaki lima melalui pelatihan yang diberikan.
4. **Dampak Negatif:** Beberapa dampak negative juga teridentifikasi, seperti kesenjangan dalam pemberdayaan antar lokasi dan beberapa ketidakpastian dalam kebijakan.
5. **Variabilitas antar Lokasi:** terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan dampak antara Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL

Gayungan, menunjukkan bahwa faktor-faktor local dapat mempengaruhi hasil kebijakan.

6. **Rekomendasi:** Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima, menyederhanakan proses perizinan, dan memberikan dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan dan bantuan lainnya.

Kesimpulan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan dan tantangan implementasi Perda Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di dua lokasi tersebut. Rekomendasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan guna mencapai pemberdayaan yang lebih efektif dan inklusif bagi pedagang kaki lima di Surabaya.

B. SARAN

⁷⁴ Berdasarkan hasil penelitian implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi:

1. **Peningkatan Kesadaran** :Mendorong kampanye informasi dan sosialisasi secara intensif kepada pedagang kaki lima tentang hak-hak mereka, prosedur perizinan, dan manfaat dari program pemberdayaan yang disediakan.
2. **Sederhanakan Proses Perizinan**:Menyederhanakan proses perizinan usaha agar lebih mudah diakses oleh pedagang kaki lima. Pengurangan birokrasi yang berlebihan dapat membantu meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan usaha.

3. **Perkuat Fasilitas Pendukung:**Melakukan evaluasi dan peningkatan fasilitas pendukung yang diberikan oleh pemerintah, seperti tempat usaha, sanitasi, dan infrastruktur lainnya, untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan pedagang.
4. **Peningkatan Kualitas Pelatihan:**Mengkaji dan meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan kepada pedagang kaki lima. Menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan praktis dan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing.
5. **Pengelolaan Lokal yang Lebih Aktif:**Mendorong peran aktif pemerintah lokal dan kelompok masyarakat setempat dalam pengelolaan Sentral PKL. Ini termasuk pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan yang diterapkan.
6. **Fleksibilitas Kebijakan Lokal:**Mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel, mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan unik dari masing-masing Sentral PKL. Pendekatan ini dapat mencakup penyesuaian regulasi dan dukungan sesuai dengan dinamika lokal.
7. **Pemetaan dan Evaluasi Rutin :**Melakukan pemetaan dan evaluasi rutin terhadap implementasi Perda untuk memahami perubahan yang terjadi dan mengidentifikasi area-area perbaikan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Saran dan rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan dan dampak positif dari kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Surabaya.

Dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan telah memberikan dampak positif terhadap sebagian pedagang kaki lima. Meskipun demikian, terdapat tantangan dan perbedaan dalam implementasi antar lokasi.

Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami dinamika keberhasilan dan kendala implementasi kebijakan pemberdayaan. Rekomendasi yang diajukan dapat menjadi landasan untuk penyempurnaan kebijakan, mengoptimalkan manfaat pemberdayaan pedagang kaki lima, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif di masa depan.

Harapan penelitian ini adalah agar temuan dan rekomendasi dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha pedagang kaki lima di Surabaya.

Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan dan mengajak untuk terus berkolaborasi guna menciptakan lingkungan usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ahrani, Yair. 1986. *Evolution and management of State Owned Enterprises*. Cambridge, M.A, Ballinger.
- Brinkerhoff, Derick. W. dan Benjamin L. Crosby. 2002. *Managing Policy Reform: Concepts and tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries*. Kumarian Press. Bloomfield.
- Bryce, Herrington J. 2005. *Player in the pub[li]c Policy Proses: Nonprofits as Social Capital and Agents*. Palgrave, McMillan.
- Budi Winarmo, 2012, *KEBIJAKAN PUBLIK TEORI, PROSES, DAN STUDI KASUS, CAPS*, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Champion D. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fadillah Putra, 2003, *Partai Politik Dan Kebijakan Publik (Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik Di Indonesia 1999-2003)*, Pustaka Pelajar Offser dan Averroes Press, Malang.
- Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian)*, UMM Press, Malang.
- Nugroho, Riant. 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estase-Metode Penelitian Kebijakan*. Gramedia Jakarta.
- Pemerintah Kota Surabaya.(2004). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

- Setiawan, H., & Wijayanto, D. A. (2020). *Analisis Efektivitas Implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Surabaya*. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 12-27.
- Soenarko SD, 2005, *Publik Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Pres, Surabaya.
- Suryadi, B.(2010). *Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Pasar Tradisional Surabaya*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 3(2), 123-136.
- Tauleka, B.A. 1995. *Implementasi Kebijakan[1]Naan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kotamadya Surabaya, Program Magister Untag*, Surabaya.
- Utami, R.A., & Santoso, B. (2005). *Dampak Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima terhadap kesejahteraan pedagang di pasar tradisional Surabaya*. *Jurnal pemikiran dan Gagasan Ekonomi*, 18(1), 25-35.
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Tesis Sumantri.pdf

ORIGINALITY REPORT

41 %
SIMILARITY INDEX

41 %
INTERNET SOURCES

19 %
PUBLICATIONS

13 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.unhas.ac.id 5%
Internet Source

2 repository.uinjambi.ac.id 3%
Internet Source

3 repository.ub.ac.id 3%
Internet Source

4 digilib.uin-suka.ac.id 1%
Internet Source

5 repository.lppm.unila.ac.id 1%
Internet Source

6 kebunhadi.blogspot.com 1%
Internet Source

7 repository.iainkudus.ac.id 1%
Internet Source

8 nurulkhaifa.blogspot.com 1%
Internet Source

9 erepository.uwks.ac.id 1%
Internet Source

10	www.academia.edu Internet Source	1 %
11	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
12	docplayer.info Internet Source	1 %
13	123dok.com Internet Source	1 %
14	repository.fisipkum.unsera.id Internet Source	1 %
15	id.123dok.com Internet Source	1 %
16	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
18	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
19	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
20	pdfcoffee.com Internet Source	1 %
21	journal.ummat.ac.id Internet Source	1 %

22	himia.umj.ac.id Internet Source	<1 %
23	masduki.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	bdkpalembang.com Internet Source	<1 %
25	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
26	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
27	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
29	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
33	library.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %

34	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
35	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
36	www.avepress.com Internet Source	<1 %
37	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
38	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
39	id.scribd.com Internet Source	<1 %
40	www.scribd.com Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	<1 %
42	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
43	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
44	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
45	media.neliti.com	

Internet Source

<1 %

46

sitisahati02.blogspot.com

Internet Source

<1 %

47

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

48

eprints.umpo.ac.id

Internet Source

<1 %

49

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

50

artikelpendidikan.id

Internet Source

<1 %

51

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

52

akrabjuara.com

Internet Source

<1 %

53

eprints.stainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

54

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

55

repository.ut.ac.id

Internet Source

<1 %

56

digilib.iain-jember.ac.id

Internet Source

<1 %

57	en.ispeco.org Internet Source	<1 %
58	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
59	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
60	repository.ubb.ac.id Internet Source	<1 %
61	kumpulaninfosite.wordpress.com Internet Source	<1 %
62	www.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
63	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
64	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
65	www.jurnalp4i.com Internet Source	<1 %
66	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
67	Annas Nashiruddin, Banu Witono. "Pengaruh PDRB, Investasi, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah", Journal of	<1 %

Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024

Publication

68

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

69

Fransiskus Dodi. "KODE ETIK HAKIM",
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL
ILMU HUKUM, 2020

Publication

<1 %

70

ji.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

71

library.universitaspertamina.ac.id

Internet Source

<1 %

72

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

<1 %

73

repository.polimedia.ac.id

Internet Source

<1 %

74

Azida Nurul Hayya, Denok Kurniasih dan Dyah
Retna Puspita. "IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
KEBUME", Journal of Governance, 2017

Publication

<1 %

75

eprints.perbanas.ac.id

Internet Source

<1 %

76	fondoeditorial.unat.edu.pe Internet Source	<1 %
77	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
78	repository.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
79	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
80	jurnalprodi.idu.ac.id Internet Source	<1 %
81	repo.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	<1 %
82	ahmaddahlan.net Internet Source	<1 %
83	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
84	repositorio.unifei.edu.br Internet Source	<1 %
85	www.banjirembun.com Internet Source	<1 %
86	Harpisyah Harpisyah, Umi Kalsum. "Evaluasi Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab (Studi Kasus: Dusun Baru Pusat Jalo	<1 %

Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo)", Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2023

Publication

87

Hastuti Hastuti, Zayana Zayana, Nurlina Ahmad Bully, Ika Kartika Putri. "Pelatihan Pengembangan Pariwisata Kuliner Melalui Media Sosial Pada UMKM", Abdimas Polsaka, 2022

Publication

<1 %

88

Stevany Afrizal, Putri Tunggal Dewi. "DAMPAK COVID-19 PADA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SERANG", Jurnal Sosiologi Nusantara, 2021

Publication

<1 %

89

ppid.tegalkab.go.id

Internet Source

<1 %

90

repository.its.ac.id

Internet Source

<1 %

91

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

92

repository.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

93

Amil Amil, Taufik Rachman. "Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor

<1 %

Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar)", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019

Publication

94

Diana Sari, Mulyono Yalia. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KOTA CIREBON", Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 2019

Publication

<1 %

95

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

96

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

97

jeams.unmerbaya.ac.id

Internet Source

<1 %

98

midwiferyeducator.wordpress.com

Internet Source

<1 %

99

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

100

repository.unima.ac.id:8080

Internet Source

<1 %

101

toffeedev.com

<1 %

102 utamiip.blogspot.com
Internet Source

<1 %

103 Maskuri Ismail, Khairul Anwar. "KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SERTA RELEVANSINYA TERHADAP MUTU LULUSAN YANG ISLAMI", Edupedia : Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam, 2021
Publication

<1 %

104 agussubagyo1978.wordpress.com
Internet Source

<1 %

105 ojs.uma.ac.id
Internet Source

<1 %

106 Jakranah Jakranah, Titi Yuniarti, I Gusti Ayu Arini. "Analisis Strategi Pedagang Kaki Lima dalam Mempertahankan Usaha pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sekarbela", Target : Jurnal Manajemen Bisnis, 2022
Publication

<1 %

107 Sugiannor Sugiannor. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin", Madika: Jurnal Politik dan Governance, 2022
Publication

<1 %

108

adm.fisip.unpatti.ac.id

Internet Source

<1 %

109

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

110

doku.pub

Internet Source

<1 %

111

ejournal.iaida.ac.id

Internet Source

<1 %

112

journal.stieamkop.ac.id

Internet Source

<1 %

113

journal.unpar.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On